

**DETERMINAN PERSEPSI ETIKA ATAS PENGHINDARAN DAN
PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK BADAN HOTEL
YANG TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PHRI KOTA MALANG
JAWA TIMUR)**

Disusun Oleh:

Aryo Sumarsono

NIM. 125020302111003

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**DETERMINAN PERSEPSI ETIKA ATAS PENGHINDARAN DAN
PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK BADAN HOTEL
YANG TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PHRI KOTA MALANG
JAWA TIMUR)**

Yang disusun oleh:

Nama : Aryo Sumarsono
NIM : 125020302111003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 9 Maret 2018

Dosen Pembimbing



Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA

NIP. 2013128812142001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“DETERMINAN PERSEPSI ETIKA ATAS PENGHINDARAN DAN
PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK BADAN HOTEL
YANG TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PHRI KOTA MALANG
JAWA TIMUR)”**

Yang disusun oleh:

Nama : Aryo Sumarsono
NIM : 125020302111003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

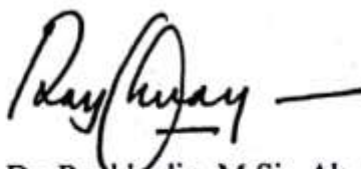
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Maret 2018 dan menyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA
NIP. 2013128812142001
(Dosen Pembimbing)
2. Putu Prima Wulandari, MSA., Ak
NIP. 2011068702152001
(Dosen Penguji I)



Malang, 23 Maret 2018
Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Rochhudin M. Si., Ak., CA
NIP. 19621127 198802 1 001



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryo Sumarsono

NIM : 125020302111003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**DETERMINAN PERSEPSI ETIKA ATAS PENGHINDARAN DAN
PENGGELOPAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK BADAN HOTEL
YANG TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PHRI KOTA MALANG
JAWA TIMUR)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 9 Maret 2018



Aryo Sumarsono

NIM. 125020302111003

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing dari:

Nama : Aryo Sumarsono

NIM : 125020302111003

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : **DETERMINAN PERSEPSI ETIKA ATAS
PENGHINDARAN DAN PENGGELAPAN PAJAK
(Studi Pada Wajib Pajak Badan Hotel Yang Terdaftar
Sebagai Anggota PHRI Kota Malang Jawa Timur)**

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Wajib Pajak Badan Hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang, pada tanggal 4 September sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017.

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Maret 2018

Dosen Pembimbing,



Ayu Fery Puspita, MSA., Ak., CA

NIP. 2013128812142001

RIWAYAT HIDUP

Nama : Aryo Sumarsono
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 24 Juni 1993
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Perum. GSI Blok A5 NO. 8. Serdang-Banten
Alamat Email : aryo.sumarsono@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2000-2006) : SD Negeri 2 Cilegon
SMP (2006-2009) : SMP YPWKS Cilegon
SMA (2009-2012) : SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon
Perguruan Tinggi (2012-2018) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Riwayat Pendidikan Non Formal:

Program Pelatihan Brevet Pajak A, B, C (2015)

Pengalaman Organisasi:

- Panitia Mr. Taxes, Divisi Humas dan Transportasi dan Keamanan (13 Oktober 2015)

**DETERMINAN PERSEPSI ETIKA ATAS PENGHINDARAN DAN
PENGGELOPAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK BADAN HOTEL
YANG TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PHRI KOTA MALANG
JAWA TIMUR)**

Oleh:

Aryo Sumarsono

(aryo.sumarsono@gmail.com)

Dosen Pembimbing:

Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan persepsi wajib pajak mengenai etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak badan hotel yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 54 wajib pajak badan hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode *sampling* jenuh atau metode sensus. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode statistik dengan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciens* (SPSS). Hasil dari penelitian ini adalah keadilan, diskriminasi, dan pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Sistem perpajakan dan *Machiavellianism* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.

Kata kunci: Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, Machiavellianism,

pengetahuan pajak, persepsi etika, penghindaran pajak, penggelapan pajak

**DETERMINANTS OF ETHICAL PERCEPTION ON TAX AVOIDANCE
AND TAX EVASION (A STUDY IN HOTEL TAXPAYERS LISTED IN PHRI
IN MALANG, EAST JAVA)**

By:

Aryo Sumarsono

(aryo.sumarsono@gmail.com)

Advisor:

Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA

ABSTRACT

The objective of this study is to identify determinants of taxpayers regarding ethics in tax avoidance and evasion. This study was conducted in hotel taxpayers listed as the member of PHRI (Indonesian Hotel and Restaurant Association) in Malang. This study uses primary data obtained from questionnaires distributed to 54 association members, selected using saturated sampling, or census, method. The hypothesis was assessed using statistical method in Statistical Package for the Social Science (SPSS). The results show that fairness, discrimination, and tax knowledge influence ethical perception toward tax avoidance and evasion. However, tax system and Machiavellianism do not influence the perception.

Keywords: *fairness, tax system, discrimination, Machiavellianism, tax knowledge, ethical perception, tax avoidance, tax evasion*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas Rahmat dan karunia-Nya, serta kemudahan yang diberikan serta salam kepada Nabi besar Muhammad *Salalallahu Alaihi Wasallam*. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian: **“DETERMINAN PERSEPSI ETIKA ATAS PENGHINDARAN DAN PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK BADAN HOTEL YANG TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PHRI KOTA MALANG JAWA TIMUR)”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama penelitian dan penyusunan dalam skripsi ini, penulis tidak lupa dari banyak kendala yang penulis alami. Kendala tersebut dapat terselesaikan berkat doa, bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, terutama kepada yang saya hormati:

1. Ibu, Ayah, dan adik-adik tercinta yang luar biasa, yang telah memberi dukungan, serta doa yang tiada henti. Terima kasih juga untuk seluruh anggota keluarga lainnya yang selalu mendukung dan mendoakan. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* membalas semua kebaikan semuanya.
2. Bapak Nurkholis , SE., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

3. Bapak Dr. Drs. Roekhudin, M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Ibu Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA. Selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan yang baik dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Putu Prima Wulandari, MSA., Ak selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staff di lingkungan Universitas Brawijaya yang telah memberi arahan, bimbingan dan wawasan serta pengalamannya, baik di dalam ataupun diluar perkuliahan.
7. Terimakasih untuk Tri Yoga Utomo Rahimahullah yang sudah mendahului kami. Terimakasih atas nasihat, motivasi, serta jasa-jasa yang sudah banyak diberikan. Semoga Allah memberikan tempat yang layak, Aamiin.
8. Tidak kalah penting untuk sahabat-sahabat TEMULAWAK. Terima kasih yang sebesar-besarnya selalu mendukung, motivasi, dan doanya.
9. Tidak kalah penting juga sahabat-sahabat di KENYAL yang selalu memberi arahan, dukungan, dan motivasi. Terima kasih atas kebaikan kalian semua.
10. Tidak kalah penting untuk teman-teman dan sahabat-sahabat lain Angkatan 2012 atas ilmu, ide, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.

Malang, 12 April 2018

penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.....	13
2.1. Perpajakan	13
2.1.1. Definisi Pajak	13
2.1.2. Fungsi Pajak	14
2.1.3. Jenis Pajak	16
2.2. Persepsi.....	19
2.3. Etika	20
2.3.1. Definisi Etika.....	20
2.3.2. Jenis-jenis Etika.....	20
2.3.3. Etika Pajak	21
2.4. Perencanaan Pajak	22
2.4.1. Penghindaran dan Penggelapan Pajak	23

2.3.2. Penghindaran Pajak	24
2.3.3. Penggelapan Pajak	25
2.5. Keadilan.....	26
2.5.1. Definisi Keadilan	26
2.5.2. Cara Mewujudkan Keadilan Pajak	27
2.6. Sistem Perpajakan	30
2.6.1. Definisi Sistem Perpajakan	30
2.6.2. Sistem Pemungutan Pajak	31
2.6.3. Tarif Pajak	32
2.7. Diskriminasi.....	34
2.7.1. Diskriminasi Perpajakan	36
2.8. <i>Machiavellianism</i>	36
2.9. Pengetahuan Pajak	37
2.10. Model Penelitian.....	39
2.11. Perumusan dan Pengembangan Hipotesis.....	41
2.11.1. Konsep Persepsi Mengenai Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak.....	41
2.11.2. Hubungan Keadilan Terhadap Persepsi Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan pajak	42
2.11.3. Hubungan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak	44
2.11.4. Hubungan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak	45
2.11.5. Hubungan <i>Machiavellianism</i> Terhadap Persepsi Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak	47

2.11.6. Hubungan <i>Machiavellianism</i> Terhadap Persepsi Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1. Populasi dan Sampel	50
3.2. Data Penelitian.....	51
3.2.1. Jenis dan Sumber Data.....	51
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.3. Variabel Operasional, Indikator, Pengukuran	58
3.4. Uji Kualitas Data	71
3.4.1. Uji validitas	71
3.4.2. Uji Reliabilitas.....	72
3.5. Metode Analisis Data.....	72
3.5.1. Statistik Deskriptif.....	73
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	73
3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda	75
3.5.4. Koefisien Determinan (R^2).....	76
3.5.5. Pengujian Hipotesis	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	78
4.1. Analisis Data Hasil <i>Pilot Test</i>	78
4.1.1. Uji Validitas dan Reliabilitas	78
4.1.2. Uji Reliabilitas.....	80
4.2. Deskripsi Objek Penelitian	80
4.2.1. Responden	80
4.4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	87
4.4.1. Hasil Uji Kualitas Data	93

4.4.1.1. Uji Validitas	93
4.4.1.2. Uji Reliabilitas	93
4.4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik	94
4.4.2.1. Uji Normalitas.....	94
4.4.2.2. Uji Multikolinearitas	95
4.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas	97
4.4.3. Analisis Regresi Linear Berganda	98
4.4.3.1. Persamaan Regresi	98
4.4.3.2. Koefisien Determinan (R^2)	100
4.4.4. Pengujian Uji Hipotesis.....	102
4.4.4.1. Hipotesis I (F test/serempak)	102
4.4.4.2. Hipotesis II (t test/parsial)	103
4.4.4.3. Uji Dominan	106
4.5. Pembahasan	107
4.5.1. Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak	107
4.5.2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak	109
4.5.3. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak	110
4.5.4. Pengaruh <i>Machiavellianism</i> Terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak	111
4.5.5. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak	112
BAB V PENUTUP	114
5.1. Kesimpulan.....	114

5.2. Keterbatasan Penelitian	116
5.3. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan pajak negara Indonesia periode tahun 2011-2015.....	1
Tabel 1.2 target dan realisasi penerimaan pajak bruto negara Indonesia periode tahun 2011-2015	2
Tabel 1.3 Jumlah Kasus Wajib Pajak Melakukan Modus Operandi Tahun 2011-2015	3
Tabel 4.2 Pernyataan Kuesioner Tidak Valid	80
Tabel 4.3 Hasil Penyebaran Kuesioner	82
Tabel 4.4 Data Statistik Responden.....	84
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Keadilan (X1)	88
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Perpajakan (X2).....	89
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Diskriminasi (X2)	89
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel <i>Machiavellianism</i> (X4).....	90
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Pajak (X5)	91
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak.....	92
Tabel 4.11 Uji Reliabilitas	94
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas.....	95
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	96
Tabel 4.14 Persamaan Regresi	98
Tabel 4.15 Koefisien Korelasi dan Determinasi.....	101
Tabel 4.16 Uji F / Serempak	102
Tabel 4.17 Hasil Uji t / Parsial	103
Tabel 4.18 Hasil Uji Dominan.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	39
Gambar 4.1 Data Statistik Responden Berdasarkan Jabatan Responden.....	84
Gambar 4.2 Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak.....	84
Gambar 4.3 Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	85
Gambar 4.4 Data Statistik Responden Berdasarkan Status Wajib Pajak	86
Gambar 4.5 Data Statistik Responden Berdasarkan Kategori Omset.....	86
Gambar 4.6 Data Statistik Responden Berdasarkan Kategori Kelas Hotel	87
Gambar 4.7 Hasil <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan dari dalam negeri, yang bersumber utama dari pajak. Ini seperti yang tercantum dalam Tabel 1.1 di bawah ini yang menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Negara Indonesia.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Negara Indonesia
Periode Tahun 2011-2015
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)	Penerimaan Bukan Pajak (Rp)	Total Penerimaan Negara	% Penerimaan Pajak	% Penerimaan Bukan Pajak
2011	873.874,00	331.472,00	1.205.346,0	72.50%	28%
2012	980.518,10	351.804,70	1.332.322,8	74%	26%
2013	1.077.306,7	354.751,90	1.432.058,6	75%	25%
2014	1.146.865,8	398.590,50	1.545.456,3	74%	26%
2015	1.489.255,5	269.075,40	1.758.330,9	85%	15%

Sumber: Departemen Keuangan, dalam *www.bps.go.id*, diolah, 2016

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan Negara dilakukan dari tahun ketahun dengan melakukan penyempurnaan sistem perpajakan. Upaya tersebut antara lain dengan merubah undang-undang perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan pelayanan pada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak, dan mengubah sistem pemungutan pajak (Prameswari, 2008).

Namun, tingginya persentase penerimaan Negara Indonesia dari pajak tidak sejalan dengan pertumbuhan penerimaan pajak, karena pertumbuhan penerimaan pajak belum optimal dalam pencapaiannya. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak Negara Indonesia belum tercapai sesuai dengan target selama 5 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Negara Indonesia
Periode 2011-2015
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Estimasi Penerimaan Pajak	Realisasi Bruto Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2011	878.685,2	873.721,4	99,44%
2012	1.016.237,3	980.470,8	96,48%
2013	1.148.368,6	1.077.309,2	93,81%
2014	1.246.106,9	1.146.863,5	92,04%
2015	1.489,2	1.240,3	83,29%

Sumber: Laporan Keuangan, Kementerian Keuangan, (www.kemenkeu.co.id), diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan estimasi penerimaan pajak. Persentase penerimaan pajak dari tahun 2011 sampai tahun 2015 belum mencapai 100%. Jika dilihat mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, persentase penerimaan pajak Negara Indonesia terbesar terjadi pada tahun 2011 dan terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu masing-masing 99,44% dan 83,29%.

Berbagai faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak salah satunya adalah masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Berdasarkan Laporan Tahunan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2011-2015, masih banyak permasalahan yang terjadi pada wajib pajak badan yang melakukan modus operandi tindak pidana. Ditemukan beberapa jumlah wajib pajak yang terindikasi melakukan modus operandi dengan beberapa kasus pada tahun 2011-2015. Modus operandi merupakan suatu operasi yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam merencanakan suatu kejahatan. Jumlah wajib pajak dan kasus modus operandi yang terjadi pada tahun 2011-2015 akan disajikan pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Kasus Wajib Pajak Melakukan Modus Operandi
Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah	Kasus
2011	49	(1) Menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, (2) Melaporkan SPT yang tidak benar dan tidak lengkap, (3) Memungkut/memotong tetapi tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.
2012	50	(1) Menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, (2) Memungkut/memotong tetapi tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, (3) Tidak menyampaikan SPT, (4) Menggelapkan omzet, (5) Membuat Surat Setoran Pajak palsu.
2013	47	(1) Menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, (2) Memungkut/memotong tetapi tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, (3) Tidak menyampaikan SPT, (4) Tidak mendaftarkan diri sebagai NPWP, (5) Menyalahgunakan NPWP yang tidak sesuai haknya, (6) Menyampaikan SPT dengan pengisian tidak benar, (7) Menyalahgunakan SPT yang bukan haknya untuk kompensasi pajak, (8) Pencucian uang, (9) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen yang dipalsukan.

Tabel 1.3
Jumlah Kasus Wajib Pajak Melakukan Modus Operandi
Tahun 2011-2015 (Lanjutan)

2014	42	(1)) Menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, (2) Memungkut/memotong tetapi tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, (3) Tidak menyampaikan SPT.
2015	65	(1)) Menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, (2) Memungkut/memotong tetapi tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, (3) Menyampaikan SPT yang tidak benar, (4) Tidak menyampaikan SPT.

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2011-2015, diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas diketahui bahwa pada tahun 2011-2015 ditemukan sejumlah wajib pajak dan kasus yang terindikasi dalam melakukan modus operandi dalam upaya melakukan penggelapan pajak. Selama jangka waktu dari tahun 2011-2015, tahun 2015 merupakan tahun yang paling banyak ditemukan wajib pajak yang terindikasi melakukan modus operandi.

Dalam melakukan upaya pengurangan beban pajaknya, pelaku-pelaku bisnis tersebut bisa saja melakukan penghindaran pajak bahkan penggelapan pajak supaya tujuan mereka tercapai. Upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak negara serta menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sebuah biaya atau beban yang akan mengurangi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak berlawanan dengan tujuan wajib pajak yang cenderung ingin meminimalkan besarnya pajak yang akan dibayar. Sistem pemungutan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia memberi

kebebasan untuk wajib pajak dalam menghitung sendiri besaran pajak yang terutang. Hal ini tentu memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang terutang melalui mekanisme perencanaan pajak (Ningsih, 2015). Dalam kewenangan penuh yang dimiliki wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak harus memiliki kesadaran penuh dalam menyetorkan pajaknya. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralitas perpajakan (*tax morality*) masyarakat. *Tax morality* atau kesadaran penuh dalam membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran bernegara. Apabila kesadaran bernegara tinggi, maka berarti pula moralitas perpajakannya juga tinggi (Siahaan, 2010).

Terdapat dua jenis perencanaan pajak, yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak berusaha meminimalkan jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada sehingga dianggap tidak melanggar aturan. Berbeda dengan penggelapan pajak yang melakukan usaha meminimalkan pajak terutang dengan menggunakan cara yang melanggar hukum (Christian, 2010). Oleh karena itu, wajib pajak perlu memiliki kesadaran dan perilaku yang etis dalam membuat keputusan untuk melakukan perencanaan perpajakan baik itu penghindaran ataupun penggelapan pajak agar dapat memberikan kontribusi maksimum bagi entitas dan negara.

Menurut keterangan yang diperoleh dari situs resmi DJP Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Juni 2015, Kantor Wilayah

(kanwil) DJP Jawa Timur I menyelenggarakan sosialisasi Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur Pajak fiktif) untuk wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Jawa Timur III. Berdasarkan analisis Satuan Tugas (satgas) yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Timur terdapat 841 pengguna Faktur Pajak Fiktif dengan nominal PPN fiktif senilai Rp 375 Miliar. Kegiatan satgas telah dimulai sejak bulan Juli 2014 di seluruh DJP se-Jakarta saja dan pada tahun 2015 telah diperluas dan dilakukan di provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga mencapai wilayah Jawa Timur (DJP, 2015).

Seiring dengan satgas yang telah dilakukan di kanwil DJP Jawa Timur III yang merupakan kanwil DJP yang mewakili kota Malang di Jawa Timur. Sehubungan dengan diadakannya kegiatan satgas Faktur Fiktif yang telah mencakup wilayah Jawa Timur, kota Malang merupakan salah satu wilayah yang melakukan penanganan Faktur Fiktif tersebut. Keterangan yang diperoleh dari situs berita online Tempo, menerangkan bahwa untuk wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III, Malang, ditemukan 48 kasus Faktur Fiktif dengan nilai Rp 14,13 Miliar (Panggabean, 2015). Dalam keterangan yang diperoleh tersebut, jumlah ditemukan 48 kasus Faktur Fiktif tidak menunjukkan kejelasan apakah kasus tersebut dilakukan oleh wajib pajak badan atau orang pribadi.

Jika dipandang dari sudut etika, penghindaran pajak dan penggelapan pajak masih dipertanyakan apakah menjadi tindakan yang dianggap etis atau

tidak untuk dilakukan. Pandangan masyarakat terhadap sesuatu yang dikatakan etis atau tidak, didasarkan pada sebagian alasan sesuai sudut pandang masing-masing masyarakat itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Hutami (2010) menunjukkan bahwa jika dilihat dari teori etika, penghindaran dan penggelapan pajak merupakan suatu pelanggaran etika. Dilihat dari segi hukum, penghindaran pajak masih dianggap sebagai tindakan legal atau masih dalam ranah hukum yang berlaku. Namun dari segi moral atau etika, baik penghindaran atau penggelapan pajak keduanya sama-sama tindakan yang menunjukkan rendahnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajak, karena sama-sama merugikan banyak orang (www.infopajak.id).

Nickerson *et al.* (2009) dalam konteks Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai persepsi etika atas penggelapan pajak menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Dalam konteks yang sama yaitu konteks persepsi etika atas penggelapan pajak, Ningsih (2015) meneliti ke sejumlah wajib pajak orang pribadi dan menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nickerson *et al.* (2009) bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nickerson *et al.* (2009) bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap

persepsi etika atas penggelapan pajak. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nickerson *et. al.* (2009) yaitu diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak.

Dalam konteks yang berbeda terkait penelitian kepada sejumlah wajib pajak orang pribadi mengenai persepsi etika penghindaran dan penggelapan pajak, Pratama (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh *Machiavellianism*, dan pengetahuan pajak terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki sifat *machiavellianism* yang tinggi akan memandang bahwa penghindaran pajak dan penggelapan pajak merupakan perilaku yang etis. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang tinggi tidak selalu memandang bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis.

Adanya kasus penghindaran dan penggelapan pajak yang terjadi serta hasil penelitian yang didukung dari sudut pandang masyarakat mengenai etika atas penghindaran dan penggelapan pajak, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai persepsi etika dalam konteks yang berbeda yaitu persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak yang bersumber dari wajib pajak badan hotel pada tahun 2009-2013

mengalami kenaikan dan penurunan. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan dan penurunan penerimaan pajak daerah Kota Malang pada wajib pajak hotel tersebut karena adanya usaha-usaha penghindaran pajak baik secara aktif maupun pasif yang dilakukan oleh wajib pajak, banyaknya objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak maupun objek pajak yang terlepas dari pengawasan pihak fiskus (Yuliani, Hidayat, dan Topowijono, 2015). Dengan adanya kasus seperti yang sudah di jelaskan di atas, maka penelitian ini memilih responden hotel yang ada di Kota Malang, difokuskan kepada hotel yang telah terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan.

Dengan demikian, peneliti menguji variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, *Machiavellianism*, dan pengetahuan pajak dalam konteks persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel dengan judul **“Determinan Persepsi Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan Hotel yang Terdaftar Sebagai Anggota PHRI Kota Malang Jawa Timur)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel?

2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel?
4. Apakah *Machiavellianism* berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel?
5. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam studi ini yaitu untuk:

1. Menguji pengaruh keadilan terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel
2. Menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel
3. Menguji pengaruh diskriminasi terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel
4. Menguji pengaruh *Machiavellianism* terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel
5. Menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak badan hotel

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, *Machiavellianism* dan pengetahuan pajak terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak pada wajib pajak. Dalam penelitian ini peneliti ingin membuktikan secara empiris bahwa keadilan, sistem perpajakan yang berlaku, adanya diskriminasi, *Machiavellianism* dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran kepada pihak pemerintah mengenai faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran dan penggelapan pajak, serta dapat menjadi referensi bagi pihak lain dan penelitian selanjutnya mengenai perpajakan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi:

a. Peneliti

Penelitian ini akan memberikan wawasan bagi peneliti terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Selain itu untuk memberikan wawasan mengenai apa saja yang dapat membuat peneliti jika nanti menjadi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para akademisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak, terutama untuk Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai bahan referensi atau bahan ajar dalam perkuliahan.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pada para pembuat kebijakan, khususnya terkait dengan sistem perpajakan yang baik diterapkan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman pemerintah tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, *Machiavellianism* dan pengetahuan pajak terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Selain itu pemerintah diharapkan dapat menentukan sikap yang bijaksana dalam membuat peraturan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Perpajakan

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut para ahli, masing-masing definisi mengenai pajak memiliki pengertian sendiri akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat mempengaruhi penerimaan suatu negara yang akan digunakan untuk kegiatan rumah tangga negara.

Resmi (2013:1) menjelaskan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak memiliki beberapa unsur yaitu iuran berasal dari rakyat untuk negara, berdasarkan Undang-undang, tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara secara langsung, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Kesimpulan dari definisi di atas adalah bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat kepada nagara yang rutin dikeluarkan serta bersifat

memaksa, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk digunakan bagi keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang membayar pajak akan mendapatkan timbal balik dari pembayaran pajak tersebut namun tidak secara langsung diterima bagi setiap individu.

2.1.2. Fungsi Pajak

Resmi (2013:3) membagi fungsi pajak dalam suatu negara ke dalam dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair* yang artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah dalam hal ini berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Maksud dari fungsi ini adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan fungsi pengatur antara lain:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah nilai suatu barang maka

tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, yang dimaksud adalah agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi pula dalam membayar pajak, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, maksudnya supaya para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, rokok, baja dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atas polusi atau atas bahan produksinya.
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, yang dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan fungsi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi *budgetair* merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk menambah pendapatan Negara sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan fungsi *regularend* merupakan alat yang

digunakan pemerintah untuk mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

2.1.3. Jenis Pajak

Resmi (2013:7) mengelompokkan jenis-jenis pajak menjadi 3, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari:

- a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Sebagai contoh adalah PPh. PPh dibayarkan oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi karena terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, misalkan penyerahan barang atau jasa. Sebagai contoh adalah PPN. PPN terjadi karena terdapat penambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak penjual, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen.

2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:

a. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh dari pajak subjektif adalah PPh. Dalam pengenaan PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Dalam pengenaan PPh orang pribadi tersebut harus memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan tersebut digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh dari pajak objektif adalah seperti PPN, PPnBM, serta PBB.

3. Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak terdiri dari:

a. Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh pajak Negara yaitu PPh, PPN, PPnBM.

b. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak di Negara Indonesia beraneka ragam, yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi tertentu untuk mencapai pendapatan Negara yang maksimal, yang pada

akhirnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum demi kemakmuran rakyat.

2.2. Persepsi

Secara sempit persepsi merupakan suatu tangkapan rangsang dari luar panca indra. Sedangkan persepsi secara luas adalah sebagai suatu pengertian, pemahaman, penafsiran terhadap suatu objek tertentu (Rachmadi, 2014). Pareek dalam Rachmadi (2014) menyebutkan bahwa perspsi mencakup dua proses kerja yang memiliki keterkaitan atau saling terkait, yaitu:

1. Menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan, dan indera lainnya
2. Penafsiran atau penjelasan arti atas kesan-kesan inderawi tersebut yang dimaksud adalah arti ditetapkan melalui kesan-kesan inderawi dengan struktur pengertian adanya keyakinan yang muncul dan melalui pengalaman masa lalu seseorang dan struktur evaluatif (nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang).

Persepsi adalah suatu proses dimana seorang individu memilih mengevaluasi dan mengorganisasi stimulus dari lingkungannya (Prasetyo, 2010). Dengan demikian, maka persepsi dapat membentuk individu melalui proses evaluasi dan organisasi dari lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan maksud yang dijelaskan oleh Gibson (2001) yaitu, pengaruh persepsi dalam membentuk perilaku individu sebagai warga negara dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai konklusi tentang persepsi individu bahwa persepsi adalah proses menerima, mengorganisasi dan mengartikan suatu obyek.

2.3. Etika

2.3.1. Definisi Etika

Etika berasal dari kata Yunani yaitu "*ethos*" yang memiliki arti "adat istiadat" atau "kebiasaan". Etika bisa dikatakan memiliki makna yang sama dengan moral. Etika dan moralitas merupakan sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang tetap dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan (Keraf, 1998:14). Ridwan (2014) menjelaskan bahwa etika merupakan pembelajaran perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Ukuran baik atau tidak baiknya suatu tindakan bila dilihat dari hakikat manusia utuh adalah dilihat dari manfaat atau kerugiannya bagi orang lain.

2.3.2. Jenis-jenis Etika

Menurut Bertens etika dibedakan menjadi dua, yaitu (Syopiansyah, 2009:4):

a. Etika Sebagai Praktis

- 1) Nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh yan dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan walaupun seharusnya dipraktekkan.
- 2) Apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral.

b. Etika Sebagai Refleksi

- 1) Pemikiran moral yang berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Berbicara tentang etika sebagai praktis atau mengambil praktis etik sebagai objeknya.
- 3) Menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku seseorang.

Etika memiliki makna beragam yang berbeda, yaitu makna pertama adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok. Seperti dalam penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupannya pribadinya. Makna etika yang kedua adalah etika merupakan kajian moralitas. Hal ini memiliki arti bahwa etika berkaitan dengan moralitas. Etika adaah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat (Suminarsasi, 2011).

2.3.3. Etika Pajak

Setelah etika di kaitkan dengan moralitas, Velasquez mengembangkan pengertian etika yaitu sebagai ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Merujuk pada uraian yang dijelaskan di atas dapat diambil pengertian bahwa etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik ataukah jahat (Suminarsasi, 2011). Menurut seorang

ulama, etika pajak adalah tindakan untuk memenuhi peraturan perpajakan atau UUP yang di canangkan oleh pemerintah, dalam hal ini wajib pajak harus rutin dalam membayar pajak karena dalam membayar pajak dengan rutin, maka pembangunan akan terlaksana dengan baik (Izza dan Hamzah, 2009).

Sehubungan dengan pandangan etika mengenai penghindaran dan penggelapan pajak, penjelasan yang didapat dari www.infopajak.co.id bahwa dilihat dari segi hukum, penghindaran pajak dianggap sebagai sebuah tindakan legal atau masih dalam ranah hukum yang berlaku. Namun bila dipandang dari segi moral, baik penggelapan ataupun penghindaran pajak keduanya sama-sama tindakan yang menunjukkan rendahnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajak. Karena sama-sama merugikan banyak orang dan mengambat kesejahteraan di Indonesia.

2.4. Perencanaan Pajak

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2016:2).

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan bagian dari manajemen pajak yang merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Menurut Lumbantoruan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi

kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2016:7).

Dalam upaya meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan dalam hal tersebut adalah penghindaran (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Suandy, 2016:8). Penghindaran dan penggelapan pajak termasuk kedalam perlawanan pajak secara aktif. Perlawanan aktif itu sendiri adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak (Sumarsan, 2013:8).

2.4.1. Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Penghindaran dan penggelapan pajak merupakan salah satu dari perlawanan atau hambatan pemungutan pajak. Penghindaran dan penggelapan pajak termasuk kedalam perlawanan secara aktif dimana meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak (Mardiasmo, 2011:8). Dalam hal terkait kepatuhan perpajakan, Pratama (2017) menjelaskan bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan suatu perilaku ketidakpatuhan kepada perpajakan.

Keabanyakan orang menganggap penghindaran dan penggelapan pajak merupakan salah satu konsep yang sama yaitu tidak membayar pajak atau tidak patuh terhadap pajak, meskipun makna kedua istilah tersebut jelas berbeda. Penghindaran pajak merupakan cara yang sah untuk mengurangi pajak,

sedangkan penggelapan pajak merupakan cara yang ilegal untuk mengurangi pajak (Jones dan Rhoades, 2015 dalam Pratama, 2016).

2.3.2. Penghindaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) penghindaran pajak adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal atau tidak melanggar undang-undang. Definisi lain menurut Suandy (2016:8) tentang penghindaran pajak adalah penghindaran pajak merupakan rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

Sumarsan (2013:9) menyebutkan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Menahan diri

Yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak Contoh dari menahan diri yaitu seperti tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah. Contoh lain adalah tidak mengonsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.

2. Lokasi terpencil

Maksudnya adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh dari penghindaran pajak seperti ini yaitu seperti investor yang ingin menanamkan modalnya di suatu negara dan di dalam negara tersebut terdapat suatu wilayah

yang dikenakan tarif pajak yang rendah, maka investor yang mendirikan usaha atau cabang baru di wilayah tersebut akan dikenakan tarif pajak yang rendah.

2.3.3. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah usaha dari wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara yang illegal atau melanggar hukum dan undang-undang (Mardiasmo, 2011:9). Salah satu bentuk penggelapan pajak adalah dengan membuat faktur yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau biasa disebut faktur fiktif.

Menurut Sumarsan (2013:9), penggelapan pajak atau pengelakan pajak dapat memberikan akibat. Akibat-akibat penggelapan pajak tersebut yaitu:

1. Dalam bidang keuangan

Penggelapan pajak merupakan pos bagi kerugian kas Negara karena sumber dana berkurnag dan dapat menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lain seperti kenaikan tarif pajak dan lain-lain.

2. Dalam bidang ekonomi

Penggelapan pajak dapat mempengaruhi persaingan sehat antar pengusaha, maksudnya adalah pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dapat menekan biaya secara tidak wajar. Selain itu, penggelapan pajak menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi.

3. Dalam bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa dengan melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan diri untuk melanggar undang-undang. Jika perbuatannya

tersebut tidak diketahui oleh fiskus maka dia akan selalu mengulangi perbuatannya lagi.

2.5. Keadilan

2.5.1. Definisi Keadilan

Menurut Siahaan (2010:112), keadilan pajak terbagi menjadi 3 pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

a. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Seperti teori yang telah diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan tentang keadilan, bahwa mereka mengungkapkan keadilan harus di dasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip tersebut menyatakan bahwa suatu sistem perpajakan dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.

b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Prinsip ini menjelaskan, dalam perekonomian diperlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar pajak nya sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak tersebut. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan pajak. Prinsip ini dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah pemerataan pendapatan dari masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

c. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Prinsip horizontal menjelaskan bahwa wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak nya. Maksud dari kondisi yang sama disini adalah dalam konteks memiliki tingkat penghasilan yang sama. Wajib pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang sama, akan dikenakan pajak yang setara pula.

Prinsip keadilan secara vertikal dapat dikatakan adil jika masyarakat dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda akan dikenakan pajak penghasilan berbeda yang sesuai dengan perbedaannya. Hal ini dapat di jumpai pada penerapan tarif progresif, dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis pada wajib pajak akan diberlakukan tarif pajak yang berbeda pula.

Dari beberapa penjelasan mengenai keadilan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak dapat dilaksanakan jika memiliki timbal balik antara wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemungut. Wajib pajak yang membayar pajak dapat merasakan dampak dan mereka membayarkan pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Serta keadilan pajak dapat dirasakan jika seseorang dengan kemampuan ekonomis yang berbeda akan dikenakan tarif pajak yang berbeda begitupun dengan seseorang yang memiliki kemampuan ekonomis yang sama akan dikenakan tarif pajak yang sama pula.

2.5.2. Cara Mewujudkan Keadilan Pajak

Masalah yang sering dijumpai dalam hal pemungutan pajak adalah bagaimana cara mewujudkan keadilan pajak, sedangkan keadilan pajak memiliki

persepsi yang berbeda-beda di setiap masing-masing individu. Walaupun demikian, Negara dalam menerapkan pajak sebagai pendapatan Negara harus berusaha mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Siahaan (2010:114) membagi tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak di suatu Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan Dalam Penyusunan Undang-undang Pajak

Penyusunan undang-undang perpajakan yang adil merupakan salah satu bentuk dalam mewujudkan keadilan perpajakan. Hasil akhir dari penyusunan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa apakah pemerintah mengakomodasi kepentingan wajib pajak, seperti aturan mengenai objek pajak, cara pembayaran, hak dan kewajiban wajib pajak, sanksi pajak, dan hal-hal lainnya.

Undang-undang pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi di masyarakat, akan lebih mengakomodir perkembangan tersebut pada masyarakat dan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan membebani wajib pajak.

2. Keadilan Dalam Pelaksanaan Undang-undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan ini dinilai sangat penting dan perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai pihak yang di amanahi oleh masyarakat dan diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk

memungut pajak dari masyarakat. Untuk memberikan keadilan, pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerpakan asas-asas pemungutan pajak dengan baik.

Salah satu bentuk keadilan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh fiskus juga kepada wajib pajak. Fiskus diharuskan konsisten dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang sudah di atur dengan tetap memperhatikan kepentingan wajib pajak.

3. Keadilan Dalam Penggunaan Uang pajak

Tolak ukur dalam penerapan keadilan pajak adalah aspek penggunaan uang pajak. Dalam hal ini, aspek penggunaan uang pajak dijadikan tolak ukur untuk mengukur sejauh mana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak harus sangat diperhatikan dan menjadi tahapan yang sangat penting, karena pembayar pajak tidak menerima manfaat dari pembayaran pajak tersebut secara langsung, sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus sangat diperhatikan agar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

2.6. Sistem Perpajakan

2.6.1. Definisi Sistem Perpajakan

Pendapat yang dikemukakan oleh Tjahjono (2005:16) yaitu dari Adam Smith, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan oleh empat asas yaitu, *equality/equity*, *certainly*, *convenience of payment*, dan *economy*, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. *Equality/equity*

Equality mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

b. *Certainly*

Kepastian hukum dari undang-undang, dalam pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang harus jelas, tegas,, tidak mengandung arti ganda.

c. *Convenience of payment*

Makna dari *Convenience of payment* adalah pajak yang dipungut harus sesuai waktu, yaitu ketika wajib pajak memiliki uang.

d. *Economy*

Makna dari *Economy* adalah dalam pembuatan undang-undang pajak perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk.

Dari penjelasan unsur-unsur asas sistem perpajakan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan yang baik harus memiliki unsur ketegasan hukum yang adil, tepat dan efektif bagi wajib pajak yang dipungut.

2.6.2. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2013:11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi 3 kelompok yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Negara Indonesia menerapkan ketiga sistem pemungutan pajak tersebut. *Official assessment system* diterapkan pada (PBB). *Self assessment system* diterapkan untuk SPT Masa PPN dan SPT Pajak Penghasilan (PPh), baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. *With holding system* diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN (Ningsih, 2015).

2.6.3. Tarif Pajak

Menurut Resmi (2013:14), jenis tarif pajak dibedakan menjadi 4 yaitu tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun), yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap merupakan tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan cek atau bilyet giro untuk berapapun

jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai. Menurut Mardiasmo (2011:322) tarif bea materai untuk dokumen sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000.

2. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak maka makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh wajib pajak badan dalam negeri dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya).

3. Tarif progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Tarif progresif-proporsional

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Tarif progresif-proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh pada tahun 1984 sampai tahun 1994 dalam pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.

b. Tarif progresif-progresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat. Tarif progresif-progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh yang diberlakukan pada tahun 1995 sampai tahun 2000 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih diberlakukan sampai akhir tahun 2008 tetapi hanya untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap, dengan perubahan pada dasar pengenaan pajak.

c. Tarif progresif-degresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun. Dengan kata lain, tarif progresif-degresif merupakan kenaikan persentase yang semakin kecil.

4. Tarif Degresif (menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Dengan kata lain tarif degresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.7. Diskriminasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan

manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lain (Rahman, 2013). Dalam definisi lain, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Danandjaja, 2003:18).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Ningsih (2015) menjelaskan bahwa diskriminasi merupakan usaha manusia dengan kecenderungan untuk membeda-bedakan yang lain atas dasar-dasar faktor tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Nickerson *et. al.* (2009) menyatakan bahwa diskriminasi didefinisikan dalam lingkup perlakuan pemerintah yang berbeda dalam kondisi tertentu. Pemerintah dikatakan melakukan diskriminasi jika menerapkan aturan perpajakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja, bahkan merugikan pihak yang lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa diskriminasi merupakan suatu perilaku dimana manusia setiap individu atau kelompok cenderung untuk melakukan pembedaan-pembedaan kepada setiap individu lain atau kelompok lain

atas dasar faktor-faktor tertentu. Diskriminasi dalam perpajakan yaitu jika peraturan yang diterapkan oleh pemerintah hanya menguntungkan satu pihak tertentu saja dan bahkan merugikan pihak lain.

2.7.1. Diskriminasi Perpajakan

Pernyataan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014) mengenai diskriminasi di bidang perpajakan adalah adanya perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Diskriminasi ini kerap terjadi karena adanya suatu bentuk hubungan istimewa dapat menimbulkan ketidakadilan antara satu pihak dengan pihak lain. Misalnya dalam penerapan tarif pajak yang dilakukan berbeda-beda yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, adanya penerapan sistem yang memberikan pelayanan yang berbeda-beda tergantung besarnya pajak yang dibayarkan.

2.8. *Machiavellianism*

Sifat *Machiavellianism* telah diperkenalkan oleh seorang ahli filsuf politik dari Itali yang bernama Niccolo Machiavellian (1469-1527). Nama *Machiavellianism* kemudian diasosiasikan dengan hal yang buruk dengan menghalalkan cara dalam mencapai tujuan. Sifat *Machiavellianism* merupakan suatu keyakinan atau persepsi yang dimiliki atau diyakini dalam hubungan antar personal. Persepsi ini akan membentuk suatu kepribadian yang mendasari perilaku dengan hubungan dengan orang lain (Setiawan, 2011).

Menurut Pratama (2016), *Machiavellianism* adalah cara kerja yang licik dalam tata negara maupun perilaku umum. Orang yang memiliki sifat

Machiavellianism yang tinggi disebut Machiavellian. Seseorang yang memiliki sifat *Machiavellianism* biasanya hanya memanipulasi pada kesempatan untuk mencapai suatu tujuannya saat diperlukan. Persepsi tentang penghindaran dan penggelapan pajak bisa berbeda bagi setiap orang. Seseorang cenderung melakukan penipuan dan bersedia melakukan apa saja untuk tidak membayar pajak dan berpikir bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan hal yang dianggap normal atau wajar. Perilaku seperti ini dikenal sebagai *Machiavellianism*.

Menurut definisi di atas, *Machiavellianism* adalah sifat egois yang dimiliki oleh seseorang atau menganggap sesuatu itu baik jika menguntungkan bagi dirinya tanpa memperdulikan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat *Machiavellianism* tersebut cenderung sering melakukan manipulasi terhadap sesuatu untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Pratama (2016) mendefinisikan bahwa seseorang yang memiliki sifat *Machiavellianism* juga akan menganggap bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan hal yang wajar atau biasa saja.

2.9. Pengetahuan Pajak

Pemahaman atau pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman yang berkaitan dengan prosedur tatacara pemabayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), cara pembayaran,

tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Kotte, 2016).

Menurut Lestari dan Kusmuriyanto (2015), tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan adalah suatu hal yang sangat penting guna menentukan sikap dan perilaku wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan tentang perpajakan dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai penghindaran dan penggelapan pajak, karena seseorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pajak dapat memahami perbedaan antara kedua konsep tersebut. Sedangkan seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang rendah akan berpikir bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan hal yang sama yaitu perilaku yang negatif (Pratama, 2016). Namun kenyataannya, seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan, akan membuat orang tersebut mencari celah atau kelaemahan dari aturan perpajakan agar dapat mengurangi beban pajaknya (Lestari dan Kusmuriyanto, 2015).

Menurut definisi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki masyarakat terlebih wajib pajak dapat memberikan pandangan bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Lebih

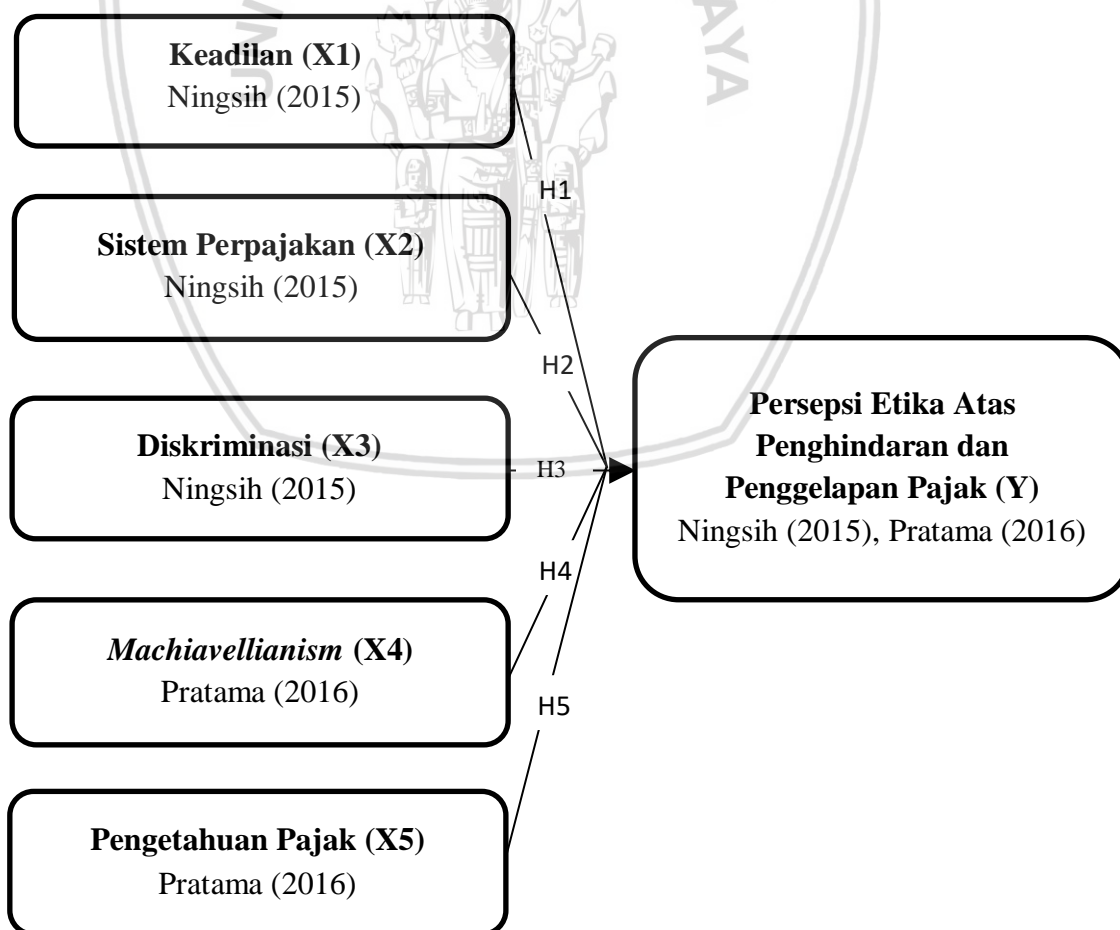
jauh bahwa pendidikan dapat mempengaruhi pandangan bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang dianggap etis atau tidak etis.

2.10. Model Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji keseluruhan variabel yang terdapat dalam penelitian terdahulu. Peneliti melakukan pengujian atas pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, *Machiavellianism*, dan pengetahuan pajak terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap persepsi mengenai etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Model penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015) dan Pratama (2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015) menunjukkan hasil bahwa keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian Nickerson *et al.* (2009) menunjukkan hasil bahwa keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) menunjukkan hasil bahwa *Machiavellianism* berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.

Pada penelitian ini, peneliti mengkombinasikan variabel-variabel independen yang telah digunakan oleh penelitian sebelumnya, yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, *Machiavellianism*, dan pengetahuan pajak. Peneliti ingin menguji variabel-variabel tersebut dalam konteks determinan persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Maka dengan ini diperoleh model penelitian sebagaimana tercantum pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.11. Perumusan dan Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Konsep Persepsi Mengenai Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Menurut Rachmadi (2014), persepsi merupakan suatu respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera yang lainnya, yang kemudian di tafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda pula.

Persepsi merupakan suatu pandangan pikiran seseorang yang muncul dari kegiatan mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan mengelola pertanda atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya (Prasetyo, 2010).

Penggelapan dan penghindaran pajak memiliki perbedaan yaitu penggelapan pajak merupakan kegiatan ilegal yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk membebaskan diri dari beban pajak. Contoh dari penggelapan pajak yaitu menghilangkan pendapatan dari pajak tahunan. Penghindaran pajak disisi lain biasanya menunjukkan situasi dimana wajib pajak telah diatur urusannya dengan cara yang sah (Pratama, 2016). Namun, dari segi moral atau etika, penghindaran dan penggelapan pajak merupakan tindakan yang menunjukkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat memberikan kerugian bagi banyak orang (www.infopajak.id).

Menurut Jones dan Rhoades (2015) dalam Pratama (2016), menyatakan bahwa penghindaran pajak dan penggelapan pajak entah bagaimana dianggap oleh kebanyakan orang suatu konsep yang sama yaitu tidak membayar pajak atau tidak

memenuhi pajak, walaupun memiliki arti secara dua terminologi berbeda. Persepsi seseorang dapat mempengaruhi pandangan mengenai penghindaran dan penggelapan pajak. Beberapa orang akan menganggap penghindaran dan penggelapan merupakan suatu hal yang berbeda, dan beberapa lain menganggap penghindaran dan penggelapan pajak merupakan hal yang sama. Selain itu, setiap individu juga akan memiliki persepsi bahwa penghindaran dan penggelapan pajak dianggap etis atau tidak etis, tergantung dengan fakta-fakta dan keadaan.

2.11.2. Hubungan Keadilan Terhadap Persepsi Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Nickerson *et. al.* (2009) menyatakan bahwa keadilan didefinisikan dalam hal yang berkaitan dengan kegunaan positif uang yang bersumber dari pajak. Dalam hal ini pemerintah dikatakan adil jika telah melaksanakan tugasnya yaitu salah satunya menggunakan uang pajak untuk keperluan negara dalam memberi kemakmuran warga negaranya. Jika keadilan yang diberikan oleh pemerintah baik, maka masyarakat atau wajib pajak akan memiliki kepercayaan kepada pemerintah terutama dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai suatu keadilan, undang-undang dalam pelaksanaan pemungutan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam undang-undang yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Lestari dan Kusmuriyanto, 2015).

Tingkat keadilan yang tinggi akan mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan muncul rasa percaya dan aman yang dirasakan masyarakat dalam membayarkan uang pajak. Hal tersebut akan membuat masyarakat beranggapan bahwa penggelapan atau penghindaran pajak yang dapat merugikan secara luas merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan (Ningsih, 2015). Pentingnya keadilan terhadap pemikiran yang dimiliki oleh masyarakat dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak.

Dari yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keadilan dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai etika penghindaran dan penggelapan pajak. Dalam hal ini, Ningsih (2015) menyatakan bahwa semakin baik penerapan keadilan dalam suatu negara, maka memiliki nilai yang semakin tinggi, begitupun dengan persepsi yang muncul mengatakan bahwa penggelapan pajak dipandang semakin tidak etis, dan nilainya semakin rendah. Hubungan seperti ini merupakan hubungan yang berlawanan, sehingga keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nickerson *et. al.* (2009) yang

menunjukkan hasil bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Namun, hasil dari penelitian di atas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015) bahwa keadilan tidak berpengaruh secara negatif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh secara positif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Keadilan berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.

2.11.3. Hubungan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Nickerson *et. al.* (2009) menunjukkan bahwa sistem perpajakan didefinisikan dalam lingkup tarif pajak dan kegunaan negatif uang yang bersumber dari pajak. Sistem perpajakan dikatakan tidak baik jika tarif pajak yang diberlakukan terlalu tinggi dan dana yang bersumber dari pajak diselewengkan oleh pemerintah. Jika sistem perpajakan semakin baik, maka masyarakat atau wajib pajak akan semakin percaya terhadap pemerintah dan mereka tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Sistem perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi etika mengenai penghindaran dan penggelapan pajak. Jika sistem perpajakan berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak cenderung menganggap penggelapan pajak dan penghindaran pajak merupakan suatu yang tidak beretika. Sebaliknya, jika sistem

perpajakan belum berjalan dengan baik, maka wajib pajak cenderung menganggap penghindaran dan penggelapan pajak merupakan suatu yang beretika (Mukharoroh, 2014).

Ningsih (2015) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etika mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) yang menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan, maka penggelapan pajak dianggap semakin tidak etis. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Yetmi, Durmayanti dan Muslim (2014) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Hasil lain juga didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2014) bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.

2.11.4. Hubungan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Atas

Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Menurut Nickerson *et. al.* (2009), diskriminasi terjadi apabila pemerintah menerapkan kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan disisi lain terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak

setuju dengan kebijakan yang berlaku. Jika kebijakan pemerintah tidak mengandung diskriminasi, maka masyarakat atau wajib pajak akan percaya terhadap kinerja pemerintah dan mereka akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Semakin banyak peraturan atau kebijakan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap aturan. Ketidakpatuhan tersebut akan berdampak pada masyarakat yang enggan membayar pajak (Ariyanti, 2013). Dengan demikian, masyarakat akan menganggap bahwa penghindaran dan penggelapan pajak adalah perilaku yang etis dilakukan jika tingkat diskriminasi tinggi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak atau tingginya tingkat diskriminasi bagi masyarakat akan mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi maka penghindaran dan penggelapan pajak semakin dianggap etis. Ningsih (2015) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi etika mengenai penggelapan pajak. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) yang menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yang menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh secara negatif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.

2.11.5. Hubungan *Machiavellianism* Terhadap Persepsi Etika Atas

Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Menurut Pratama (2016), persepsi tentang penghindaran dan penggelapan pajak bisa berbeda bagi setiap orang. Seseorang cenderung melakukan penipuan dan bersedia melakukan apa saja untuk tidak membayar pajak dan berpikir bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan hal yang dianggap normal atau wajar. Perilaku seperti ini dikenal sebagai *Machiavellianism*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) menunjukkan hasil bahwa *Machiavellianism* berpengaruh secara positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penghindaran dan penggelapan pajak. Dalam hal ini berarti bahwa semakin tinggi *Machiavellianism* yang dimiliki oleh seseorang maka cenderung akan menganggap penghindaran dan penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Cahyonowati (2012) yang menunjukkan bahwa sifat *Machiavellianism* berpengaruh secara negatif terhadap pentingnya etika dan tanggungjawab sosial. Artinya adalah jika seseorang memiliki sifat *Machiavellianism* yang tinggi maka persepsi yang dimiliki seseorang mengenai pentingnya etika semakin rendah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sifat *Machiavellianism* yang dimiliki seseorang maka seseorang tersebut akan membuat keputusan yang tidak etis dalam arti lain seseorang dengan tinggi *Machiavellianism* akan menganggap bahwa penghindaran dan penggelapan pajak

adalah perbuatan yang beretika. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Machiavellianism* berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.

2.11.6. Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Persepsi Etika Atas

Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Pengetahuan tentang perpajakan dapat mempengaruhi persepsi seseorang atau pelajar mengenai penghindaran dan penggelapan pajak, karena seseorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pajak dapat memahami perbedaan antara kedua konsep tersebut. Sedangkan seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang rendah akan berpikir bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan hal yang sama yaitu perilaku yang negatif (Pratama, 2016).

Menurut Pratama (2016), pengetahuan perpajakan akan mengubah persepsi perilaku seseorang mengenai pajak. Dengan pemahaman pajak yang dalam, seseorang dapat membedakan cara legal atau ilegal mengenai perpajakan. Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan akan lebih mematuhi karena mereka tahu prosedur mengenai perpajakan. Dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka penghindaran dan penggelapan pajak semakin dianggap tidak etis.

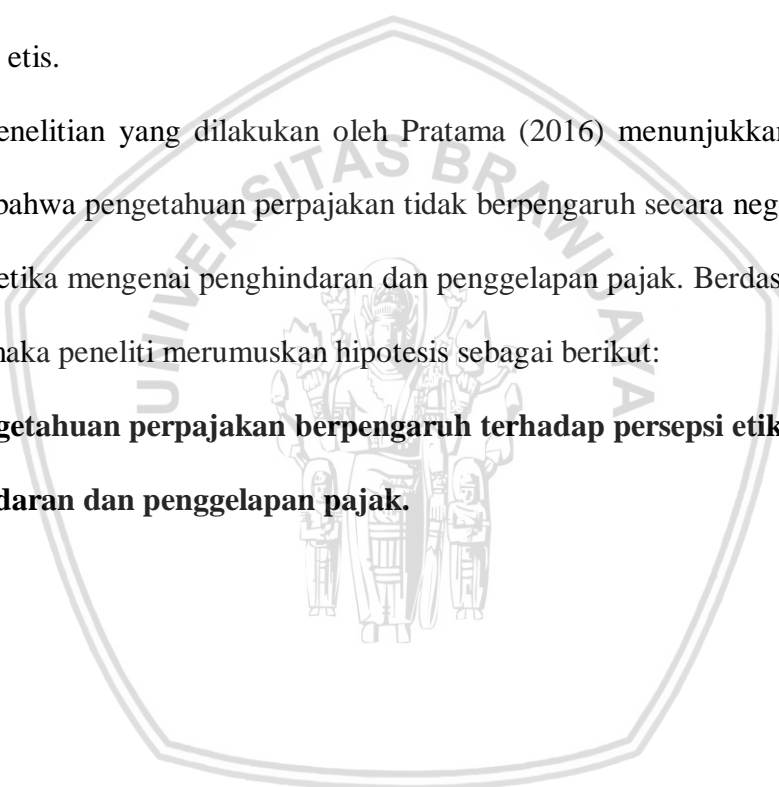
Menurut Lestari dan Kusmuriyanto (2015), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan kenyataannya bahwa

seseorang tersebut akan mencari celah maupun kelemahan dari aturan perpajakan, agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Kusmuriyanto (2015) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Maksudnya adalah semakin tinggi pengetahuan perpajakan seseorang maka penghindaran dan penggelapan pajak semakin dianggap etis.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara negatif terhadap persepsi etika mengenai penghindaran dan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran (2006:121) populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Definisi lain menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan hotel yang terdaftar di PHRI Kota Malang, Jawa Timur. Peneliti memilih populasi tersebut karena menurut peneliti Wajib Pajak Badan dapat menerapkan langsung perencanaan pajaknya, sehingga mereka dapat mengemukakan aspirasinya terkait perencanaan perpajakan yang terdiri dari penghindaran dan penggelapan pajak. Selain alasan tersebut, peneliti memilih populasi hotel karena menurut peneliti Kota Malang merupakan kota pariwisata dimana hotel mudah untuk ditemukan dan untuk memberi kemudahan peneliti serta mempercepat proses dalam melakukan penelitian.

Sekaran (2006:123) menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi. Roscoe dalam Sugiyono (2016:90) menjelaskan bahwa dalam menentukan jumlah sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500 responden. PHRI Kota Malang memiliki 54 daftar hotel dimana terdiri dari beberapa kelas yaitu mulai dari kelas melati, hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel

bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5. Maka dari itu peneliti mengambil sampel dari keseluruhan populasi yang terdaftar dalam anggota PHRI tersebut.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh atau yang biasa disebut dengan sensus karena penelitian ini menjadikan seluruh popuasi sebagai sampel yaitu hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI kota malang, yang berjumlah 54 hotel. Menurut Sugiyono (2016:85), sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

3.2. Data Penelitian

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer (*Primary Data*)

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). Definisi lain yang dikemukakan oleh Sekaran (2006:60) data primer adalah sumber informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan tujuan spesifik studi. Dengan kata lain, sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan

menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016:142). Peneliti menggunakan kuesioner dari Ningsih (2015) dan Pratama (2016) yang didapat secara langsung dari peneliti sebelumnya melalui pengiriman via *e-mail*.

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan pada wajib pajak badan hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang, Jawa Timur. Peneliti memilih sampel hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang karena menurut peneliti PHRI adalah perhimpunan hotel yang diakui oleh Negara, oleh karena itu anggota dari PHRI tersebut kemungkinan besar tidak menciptakan atau tidak berupaya dalam memuat pelanggaran dalam perpajakan.

Dalam penyebarannya, peneliti dapat mengumpulkan kembali semua kuesioner dalam kurun waktu yang relatif cukup lama yaitu dalam waktu kurang lebih 1 bulan 23 hari. Peneliti dalam melakukan pengumpulan kuesioner dengan cara menyerahkan kuesioner ke bagian resepsionis hotel dan akan disampaikan kebagian HRD (*Human Resources Development*) untuk disampaikan kepada pihak manajemen hotel. Peneliti tidak bisa menunggu kuesioner untuk diisi pada sat hari itu juga. Peneliti menunggu beberapa hari untuk mengambil kuesioner yang sudah diisi oleh pihak hotel, dan jika responden tidak paham dengan beberapa pernyataan kuesioner maka akan ditanyakan kepada peneliti pada saat pengambilan kuesioner.

b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). Definisi lain menurut Sekaran (2006: 60) data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder dalam peneitian ini didapat dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, internet berupa berita online, situs-situs resmi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan, seperti:

1. Buku-buku terkait perpajakan di indonesia, metode penelitian untuk bisnis, dan buku-buku etika.
2. Publikasi pada *website* Direktorat Jenderal Pajak, kementrian keuangan, dan Badan Pusat Statistik Indonesia.
3. Jurnal ilmiah yang terpublikasi terkait dengan persepsi etika penghindaran dan penggelapan pajak, pembahasan mengenai perilaku dan teori etika, dan pembahasan terkait tentang metodologi penelitian.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data survei. Teknik pengumpulan data survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Terdapat tiga kelompok untuk metode survei yaitu *mail survey*, *computer-delivered survei*, dan *intercept studies* (Jogiyanto, 2016:140).

Penelitian ini menggunakan survei dalam bentuk kuesioner dalam mendapatkan data primer yang bersumber dari responden. Menurut Sekaran

(2006:82) kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner langsung kepada hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang, Jawa Timur. Peneliti memutuskan untuk menggunakan kuesioner yang digunakan atau dikembangkan oleh Ningsih (2015) dan Pratama (2016), karena variabel dalam penelitian tersebut sama dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, *Machiavellianism*, dan pengetahuan perpajakan. Peneliti melakukan perubahan pada item-item pernyataan pada kuesioner sebelumnya untuk mengukur persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Tahapan-tahapan dalam penyusunan kuesioner tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti mendapatkan kuesioner Ningsih (2015) yang diperoleh dari koleksi digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang melalui website www.digilibfeb.ub.ac.id. Kuesioner yang digunakan oleh Rahman (2016) diperoleh melalui *e-mail* yang dikirim secara langsung oleh peneliti sebelumnya.
2. Setelah peneliti mendapatkan kuesioner dari peneliti sebelumnya, peneliti menyesuaikan pernyataan-pernyataan kuesioner sebelumnya. Misalnya, dalam pernyataan kuesioner sebelumnya ditujukan kepada mahasiswa, sedangkan dalam penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak badan hotel. Penyesuaian pernyataan pada kuesioner ditunjukkan pada Lampiran 2.

3. Jika terdapat pernyataan kuesioner yang salah atau ditemukan kesalahan dalam ejaan, peneliti memperbaiki atau menyesuaikan kembali item-item pernyataan tersebut.
4. Peneliti menambahkan dan menyesuaikan pernyataan pada identitas responden yang disesuaikan pada penelitian ini supaya sesuai dengan identitas responden yang akan diteliti. Tambahan pernyataan identitas responden ditunjukkan pada Lampiran 3.
5. Peneliti merubah skala pada variabel X5 yaitu Pengetahuan Pajak. Skala yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan skala benar atau salah yang kemudian diubah menggunakan skala likert 5 poin. Peneliti merubah supaya lebih jelas dan dapat memberikan jawaban yang tepat serta mendapat kesimpulan jawaban yang sama pada variabel-variabel lainnya.
6. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* 5 (lima) poin yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Alasan menggunakan skala *likert* adalah supaya dapat memberikan ketepatan jawaban atas pernyataan yang diajukan kepada responden. Menurut Sugiyono (2016:96) secara visual menggunakan skala *likert* lebih menarik dan mudah diisi oleh responden. Menurut Sekaran (2006:31) skala *likert* didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan 5 titik. Selain itu, skala *likert* dipilih karena dapat digunakan untuk menilai keberhasilan, manfaat, dan kepuasan atas pelaksanaan suatu kebijakan atau program (Usman, 2017).

Selanjutnya, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner yang telah tersusun dengan cara melakukan *pilot test*. *Pilot test* dilakukan dengan jumlah 33 kuesioner kepada non-sampel, yaitu wajib pajak dalam bentuk *guest house* di Kota Malang. Peneliti memilih sampel kepada wajib pajak *guest house* yang ditujukan kepada manajer atau pemilik karena *guest house* merupakan bidang usaha yang memiliki kesamaan pada wajib pajak hotel dimana wajib pajak hotel merupakan sampel dalam melakukan uji penelitian yang sebenarnya. Selain itu peneliti memilih sampel tersebut dengan asumsi bahwa wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan dasar perpajakan dan memiliki hak dalam memutuskan untuk tidak melakukan penghindaran dan penggeapan pajak.

Peneliti dalam memperoleh populasi dengan cara mencari *guest house* yang ada di Kota Malang secara acak dan bebas dimana peneliti langsung mendatangi *guest house* yang peneliti temukan di Kota Malang. Peneliti mengetahui letak dan jumlah *guest house* yang tersebar di Kota Malang melalui pencarian internet. Jumlah *guest house* yang peneliti temukan berjumlah 50 *guest house* dimana dari 50 *guest house* terdapat 17 *guest house* menolak untuk menerima kuesioner, sehingga peneliti hanya dapat mengelola kuesioner dengan jumlah 33 *guest house*. Kuesioner disebar dengan cara dibagikan secara langsung kepada setiap *guest house* yang ada di Kota Malang. *Pilot test* dilakukan selama kurang lebih tiga minggu atau 25 hari tepatnya yaitu pada tanggal 20 April 2017 sampai 14 Mei 2017.

Setelah peneliti melakukan *pilot test*, peneliti melakukan pengujian validitas dan reliabilitas atas pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dari data

yang telah diperoleh. Pengujian validitas dan reliabilitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang akan disebarakan pada responden yang sesungguhnya telah valid dan reliabel sehingga tidak menimbulkan bias. Setelah diolah untuk uji validitas dan reliabilitas, peneliti melakukan penyesuaian kuesioner, dengan menghilangkan atau menghapus pernyataan yang tidak valid dan reliabel, yang dapat dilihat pada Lampiran 4.

Selanjutnya setelah peneliti melakukan *pilot test*, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada sampel atau populasi penelitian secara langsung, yaitu kepada wajib pajak hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang. Tahapan penyebaran kuesioner yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti meminta surat pengantar penelitian kepada pihak Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 19 April 2017, dimana surat penelitian tersebut dibuat bersamaan untuk melakukan *pilot test*. Surat izin tersebut dapat digunakan secara langsung untuk melakukan penelitian yang sebenarnya karena tujuan pembuatan surat izin tersebut sama.
2. Peneliti meminta data mengenai daftar hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang kepada salah satu pengurus PHRI Kota Malang di hotel sahid Montana.
3. Setelah peneliti mendapatkan daftar hotel. Peneliti membuat *mapping* kelompok hotel berdasarkan alamat dan lokasi, supaya peneliti mudah dalam melakukan penyebaran secara langsung kepada hotel-hotel bersangkutan.

4. Selanjutnya peneliti menyerahkan kuesioner secara langsung ke setiap masing-masing hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang yang berjumlah 54 hotel.
5. Kuesioner diserahkan kepada *front office* untuk disampaikan ke bagian HRD hotel yang akan memutuskan untuk diteruskan kepada pihak manajemen hotel untuk mengisi kuesioner. Penyerahan kuesioner tersebut bersamaan dengan permintaan izin kepada pihak hotel apakah kuesioner bisa diterima atau tidak.
6. Peneliti memberikan batas waktu selama 3-4 hari untuk waktu penyelesaian dan pengumpulan kembali kuesioner yang diserahkan kepada bagian *front office* hotel.
7. Setelah 3-4 hari penyebaran kuesioner dilakukan, sebagian pihak hotel belum memenuhi janji dikarenakan kesibukan pada bagian manajemen hotel. Peneliti mengulur waktu dan kesempatan sampai pihak hotel mengisi dan dapat mengembalikan kuesioner.
8. Setelah melakukan penyebaran kuesioner secara keseluruhan kepada 54 hotel, terdapat 13 hotel yang tidak dapat atau tidak berkenan untuk mengisi kuesioner. Kuesioner yang berhasil terkumpul dan kembali berjumlah 41 kuesioner.
9. Selanjutnya, peneliti melanjutkan ketahap pengolahan data. Peneliti akan melakukan rekap hasil kuesioner sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 4.

3.3. Variabel Operasional, Indikator, Pengukuran

Dalam penelitian ini terdapat 6 variabel untuk menguji determinan persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Penelitian ini

menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, yaitu:

1. Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi keadilan, sistem perajakan, diskriminasi, *Machiavellianism*, dan pengetahuan pajak.

2. Variabel dependen

Variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.

Berikut akan dijabarkan dan dijelaskan dari 6 variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X1)

Variabel pertama yaitu keadilan. Nickerson *et. al* (2009) mendefinisikan keadilan dalam hal yang berhubungan dengan penggunaan dana pajak secara positif. Ningsih (2015) menjelaskan bahwa pemerintah dikatakan adil apabila dana yang bersumber dari pajak digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, perlakuan pengenaan dan pemungutan pajak harus sama, terlihat dari undang-undang pajak yang telah disusun dan dilaksanakan. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2011:21) bahwa setiap perubahan undang-undang perpajakan dilakukan bertujuan memberikan keadilan.

Variabel keadilan dalam penelitian ini berdasarkan konsep dari penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015) dengan indikator sebagai berikut:

1. Penggunaan dana pajak untuk membangun fasilitas umum yang penting.
2. Penggunaan dana pajak dengan baik dan benar.
3. Tarif pajak yang rendah.
4. Penerapan teori daya pikul dalam pemungutan pajak.
5. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak.
6. Keadilan dalam penerapan peraturan pajak.

Pengukuran indikator variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* 5 poin yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Berdasarkan indikator tersebut, maka diuraikan pernyataan dalam kuesioner sebagai berikut:

- 1) Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun dana pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting. (Indikator nomor 1).
- 2) Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun dana pajak digunakan dengan baik dan benar. (Indikator nomor 2).
- 3) Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun tarif pajaknya rendah. (Indikator nomor 3).
- 4) Penggelapan pajak dianggap etis, jika orang yang memiliki penghasilan tinggi, maka harus membayar pajak tinggi. (Indikator nomor 4).
- 5) Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak adil dalam penyusunan undang-undang pajak. (Indikator nomor 5).
- 6) Penggelapan pajak dianggap etis, jika aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan perpajakan. (Indikator nomor 6).

2. Variabel Independen (X2)

Variabel kedua yaitu Sistem Perpajakan. Nickerson *et. al* (2009) menjelaskan bahwa sistem perpajakan didefinisikan dalam lingkup tarif pajak dan penggunaan dana pajak secara negatif. Ningsih (2015) menjelaskan bahwa sistem perpajakan dikatakan baik apabila terdapat kemudahan dalam prosedur perpajakan yang ada, terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, seperti korupsi yang dapat merugikan masyarakat.

Variabel Sistem Perpajakan dalam penelitian ini berdasarkan konsep dari penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015) dengan indikator sebagai berikut:

1. Sistem perpajakan yang tidak adil.
2. Tarif pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan.
3. Pengelolaan uang pajak tidak bijaksana.
4. Prosedur pembayaran pajak yang sulit.
5. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memberi sosialisasi yang baik untuk kemudahan membayar pajak.

Pengukuran indikator variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* 5 poin yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Berdasarkan indikator tersebut, maka diuraikan pernyataan dalam kuesioner sebagai berikut:

- 1) Penggelapan pajak dianggap etis, jika sistem perpajakan yang ada tidak adil. (Indikator nomor 1).

- 2) Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan. (Indikator nomor 2).
 - 3) Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana. (Indikator nomor 3).
 - 4) Penggelapan pajak dianggap etis, jika prosedur pembayaran pajak yang ada menyulitkan. (Indikator nomor 4).
 - 5) Penggelapan pajak dianggap etis, jika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan pembayaran pajak. (Indikator nomor 5).
3. Variabel Independen (X3)

Variabel ketiga yaitu Diskriminasi. Nickerson *et. al* (2009) menjelaskan bahwa diskriminasi dalam lingkup perlakuan pemerintah yang berbeda untuk kondisi tertentu. Pemerintah dikatakan melakukan diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan disisi lain ada pihak-pihak yang dirugikan. Ningsih (2015) menjelaskan bahwa di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi, antara lain penerapan zakat pada orang Islam sebagai pengurang pajak dan adanya peraturan pemerintah dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto.

Variabel Diskriminasi dalam penelitian ini berdasarkan konsep dari penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015) dengan indikator sebagai berikut:

1. Adanya diskriminasi atas agama, ras, dan latar belakang budaya.

2. Adanya sikap pemerintah yang memenjarakan orang karena pendapat politiknya.
3. Zakat unruk agama islam digunakan sebagai faktor pengurang pajak.
4. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 dengan tarif 1% dari peredaran bruto untuk ushaa dengan omzet di bawah 4,8 Miliar.

Pengukuran indikator variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* 5 poin yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Berdasarkan indikator tersebut, maka diuraikan pernyataan dalam kuesioner sebagai berikut:

- 1) Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah melakukan diskriminasi atas agama, ras, dan latar belakang budaya. (Indikator nomor 1).
 - 2) Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah memenjarakan orang karena pendapat politiknya. (Indikator nomor 2).
 - 3) Penggelapan pajak dianggap etis, jika zakat untuk agama islam digunakan sebagai faktor pengurang pajak. (Indikator nomor 3).
 - 4) Tarif pajak untuk usaha dengan omzet dibawah 4,8 miliar dikenakan atas peredaran bruto, sedangkan untuk omzet diatas 4,8 miliar dikenakan atas laba. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi untuk usaha kecil menengah. (Indikator nomor 4).
4. Variabel Independen (X4)

Variabel keempat adalah *Machiavellianism*. Pratama (2016) menjelaskan sifat *Machiavellianism* adalah cara kerja yang licik dalam tata

negara maupun perilaku umum. Sifat *Machiavellianism* ini akan membuat seseorang bekerja dengan cara kerja yang licik dan hal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya terutama untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak.

Variabel *Machiavellianism* dalam penelitian ini berdasarkan konsep dari penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) dengan indikator sebagai berikut:

1. *Psychoticism* (kecenderungan seseorang memiliki sifat tak empatik, dan keras hati).
2. *Extraversion* (kecenderungan seseorang memiliki kenyamanan untuk berinteraksi dengan orang lain).
3. *Neuroticism* (kecenderungan seseorang yang memiliki kemampuan dalam menahan tekanan).
4. *Lie* (kecenderungan seseorang untuk berbohong).

Pengukuran indikator variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* 5 poin yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Berdasarkan indikator tersebut, maka diuraikan pernyataan dalam kuesioner sebagai berikut:

- 1) Jika diperiksa oleh aparat pajak perihal pajak, saya cenderung untuk mengatakan hal yang disenangi oleh aparat pajak, daripada mengatakan hal yang sejujurnya. (Indikator nomor 4).

- 2) Saya akan berterusterang pada konsultan dan staf pajak saya untuk menghindari pajak dengan melakukan segala hal yang diperlukan untuk itu baik dibolehkan atau tidak. (Indikator nomor 2).
 - 3) Saya tidak percaya dengan sistem perpajakan Indonesia. Saya mematuhi pajak berdasarkan pandangan pribadi saya. (Indikator nomor 1).
 - 4) Urusan perpajakan harus selalu diselesaikan diluar prosedur semestinya dan membutuhkan uang yang banyak. (Indikator nomor 4).
 - 5) Saya berpendapat bahwa semua pegawai dirjen pajak memiliki sifat yang keras kepala, memegang teguh prinsip kerja. (Indikator nomor 3).
 - 6) Saya menghindari pembayaran pajak karena banyak orang merasa penyelewengan pajak masih banyak terjadi. (Indikator nomor 1).
 - 7) Saya merasa bahwa pegawai pajak baik dalam menjalankan tugasnya. (Indikator nomor 2).
 - 8) Tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban pajak jika sudah menjadi wajib pajak. (Indikator nomor 3).
 - 9) Saya berpendapat bahwa kebanyakan orang akan lebih sedih membayar pajak yang besar daripada ditinggalkan seseorang. (Indikator nomor 3).
 - 10) Saya berpendapat bahwa wajib pajak tidak ada yang rela membayar pajak pada Negara. mereka terpaksa melakukannya. (Indikator nomor 1).
5. Variabel Independen (X5)

Variabel kelima yaitu Pengetahuan Pajak. Pratama (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak seseorang dapat mempengaruhi keputusannya dalam melakukan penghindaran dan penggelapan pajak.

Seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang tinggi seharusnya semakin patuh dalam membayar pajak.

Variabel Pengetahuan Pajak dalam penelitian ini berdasarkan konsep dari penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) dengan indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan materil pajak yang terdiri dari subjek, objek, dpp, dan tarif pajak pusat (PPh, PPN, PPnBM, PBB).
2. Pengetahuan formil pajak yang terdiri dari KUP, yaitu NPWP, pembayaran, dan pelaporan pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak, serta keberatan dan banding.

Pengukuran indikator variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* 5 poin yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Berdasarkan indikator tersebut, maka diuraikan pernyataan dalam kuesioner sebagai berikut:

- 1) Prinsip perpajakan menurut Adam Smith adalah Economy, Equality, Egaliter. (Indikator nomor 2).
- 2) Sistem perpajakan di Indonesia adalah self assessment. (Indikator nomor 2).
- 3) Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia adalah 25%. (Indikator nomor 1).
- 4) Seluruh wajib pajak wajib memungut PPN. (Indikator nomor 1).
- 5) Dasar perhitungan PPN adalah nilai jual, nilai ekspor, dan nilai impor. (Indikator nomor 1).

- 6) Pajak hotel dan restoran termasuk pajak kabupaten/kota. (Indikator nomor 2).
- 7) Pembayaran pajak dilakukan di kantor pajak. (Indikator nomor 2).
- 8) Penyetoran pajak dilampirkan dengan SPT pajak. (Indikator nomor 2).
- 9) Pembayaran pajak dapat dilakukan kapanpun. (Indikator nomor 2).
- 10) Keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi 2% per tahun. (Indikator nomor 1).
- 11) Diperbolehkan mengajukan penundaan pembayaran pajak disebabkan oleh ketidakmampuan bayar pajak. (Indikator nomor 2).
- 12) SPT terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu masa, tahunan, dan bulanan. (Indikator nomor 2).
- 13) Penyampaian SPT hanya dapat disampaikan secara manual. (Indikator nomor 2).
- 14) Denda keterlambatan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Rp 50.000. (Indikator nomor 1).
- 15) Pembetulan SPT dapat dilakukan kapan saja. (Indikator nomor 2).
- 16) Sanksi pembetulan SPT adalah denda Rp 10.000.000. (Indikator nomor 1).
- 17) NPWP karyawan dibuat paling lama dibulan ketika karyawan bekerja. (Indikator nomor 2).
- 18) Jika sudah tidak bekerja, NPWP dapat dihapuskan. (Indikator nomor 2).
- 19) Semua wajib pajak akan mengalami pemeriksaan pajak. (Indikator nomor 2).

- 20) Keberatan wajib pajak disampaikan pada pengadilan pajak. (Indikator nomor 2).
 - 21) Apabila wajib pajak tidak terima hasil banding, maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. (Indikator nomor 2).
 - 22) Semua wajib pajak melakukan pembukuan/pencatatan. (Indikator nomor 2).
 - 23) Wajib pajak baru membayar pajak setelah menerima penetapan pajak. (Indikator nomor 2).
 - 24) Penagihan pajak dapat dilakukan hingga penyitaan harta benda wajib pajak. (Indikator nomor 2).
6. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen penelitian ini adalah Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak. Penghindaran dan penggelapan pajak merupakan upaya dalam meringankan beban pajak pada wajib pajak. Penghindaran merupakan cara yang sah atau legal menurut undang-undang perpajakan, sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan yang ilegal menurut undang-undnag perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Kirchler (2007) dalam Pratama (2017) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak mereka. Penghindaran dan penggelapan pajak termasuk perilaku tidak patuh terhadap pajak (Pratama, 2017). Jika dilihat dari sisi etika, penghindaran dan penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak

beretika. Upaya memperkecil beban pajak dari yang seharusnya dengan cara penghindaran dan penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dari segi etika atau moral (Hutami, 2010)

Variabel Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak dalam penelitian ini berdasarkan konsep dari penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015) dan Pratama (2016) dengan indikator sebagai berikut:

1. Persepsi atas definisi penghindaran pajak.
2. Persepsi atas tujuan penghindaran pajak.
3. Persepsi atas cara penghindaran pajak.
4. Persepsi jika tarif pajak terlalu tinggi.
5. Persepsi jika uang pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.
6. Persepsi jika tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang dibayarkan.
7. Persepsi dengan adanya hukum yang lemah.
8. Persepsi jika terdapat diskriminasi dalam perpajakan.
9. Persepsi jika pemerintahnya korupsi.
10. Persepsi jika pemerintah tidak transparan terhadap penggunaan uang pajak.
11. Persepsi atas adanya teori daya pikul dalam perpajakan.

Pengukuran indikator variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* 5 poin yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Berdasarkan indikator tersebut, maka diuraikan pernyataan dalam kuesioner sebagai berikut:

- 1) Penghindaran pajak dianggap etis karena merupakan hak wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak. (Indikator nomor 1).
- 2) Tidak semestinya wajib pajak menghindari pajak, baik secara legal maupun illegal. (Indikator nomor 3).
- 3) Penghindaran pajak dianggap etis meskipun wajib pajak tidak memahami dengan benar peraturan perpajakan yang berlaku. (Indikator nomor 3).
- 4) Wajib pajak tidak perlu merasa bersalah jika penerimaan pajak Negara tidak tercapai akibat penghindaran pajak. (Indikator nomor 1).
- 5) Wajib pajak yang menghindari pajak pantas untuk diberikan sanksi perpajakan. (Indikator nomor 3).
- 6) Penghindaran pajak dianggap etis jika tarif pajak tinggi. (Indikator nomor 4).
- 7) Penghindaran pajak dianggap etis semua orang melakukannya. (Indikator nomor 3).
- 8) Penghindaran pajak dianggap etis jika pengelolaan pendapatan Negara belum baik, sehingga di temukan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara. (Indikator nomor 8).
- 9) Penghindaran pajak dianggap etis jika sanksi yang diberikan kecil. (Indikator nomor 6).
- 10) Penghindaran pajak dianggap etis jika sebagian uang yang diserahkan untuk pajak digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menguntungkan untuk saya. (Indikator nomor 5).

- 11) Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajaknya terlalu tinggi. (Indikator nomor 4).
- 12) Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara. (Indikator nomor 5).
- 13) Penggelapan pajak dianggap etis, jika saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang dibayarkan. (Indikator nomor 6).
- 14) Penggelapan pajak dianggap etis untuk dilakukan jika hukum yang ada lemah. (Indikator nomor 7).
- 15) Penggelapan pajak dianggap etis, jika terdapat diskriminasi dalam perpajakan. (Indikator nomor 8).
- 16) Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintahnya korupsi. (Indikator nomor 9).
- 17) Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak transparan terhadap penggunaan uang pajak. (Indikator nomor 10).
- 18) Penggelapan pajak dianggap etis, jika orang dengan penghasilan yang sama besar maka membayar pajaknya juga sama besar. (Indikator nomor 11).

3.4. Uji Kualitas Data

3.4.1. Uji validitas

Menurut Ghazali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid yang berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas

dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nilai *Pearson Correlation* lebih dari 0,5. Pertanyaan dikatakan valid jika nilai *Pearson Correlation* $> 0,5$ dan signifikansi $< 0,05$.

3.4.2. Uji Reliabilitas

Menurut Rahman (2013) reliabilitas memiliki suatu pengertian bahwa suatu instrumen dikatakan cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut cukup baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang telah dipercaya dan yang reliabel juga akan dapat dipercaya.

Menurut Ghazali (2011:47), uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha* $\geq 0,6$ dan dikatakan tidak reliabel jika *Cronbach Alpha* $\leq 0,6$.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data dengan pendekatan kuantitatif dimana alat analisis utamanya adalah statistik. Metode analisis berisi pengujian-pengujian data dari hasil jawaban kuesioner yang

diterima dan dianalisis dengan menggunakan alat statistik. Alat statistik tersebut adalah regresi linier berganda (*multiple linier regression*) dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Alat statistik ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai karakteristik pada setiap variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran dan memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011:19).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160), uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika data distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*, yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan level of *significant* ($\alpha =$

0,05), jika probabilitas $< \alpha$, distribusi dikatakan tidak normal dan jika probabilitas $> \alpha$, distribusi dikatakan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Suatu model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dan jika nilai VIF < 10 maka variabel bebas tersebut tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011:105).

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139), tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan sebaliknya, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik jika tidak terindikasi adanya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat di deteksi dengan melihat grafik *scatterplot*. Dasar analisisnya sebagai berikut:

1. Jika titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat dikatakan terjadi atau terindikasi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Dalam penelitian ini akan menguji variabel independen yaitu adalah keadilan (X1), sistem perpajakan (X2), diskriminasi (X3), *Machiavellianism* (X4), dan pengetahuan pajak (X5), apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu persepsi etika mengenai penghindaran dan penggelapan pajak (Y).

Rumus yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Persepsi Etika Mengenai Penghindaran dan Penggelapan Pajak

A = Konstanta

X₁ = Keadilan

X₂ = Sistem Perpajakan

X₃ = Diskriminasi

X₄ = Machiavellianism

X₅ = Pengetahuan Pajak

E = Kesalahan/ error

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) untuk masing-masing variabel independen.

3.5.4. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2011:97). Nilai koefisien determinasi tersebut terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), dimana semakin tinggi R^2 dari suatu model regresi atau semakin mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi perubahan variabel dependen.

3.5.5. Pengujian Hipotesis

Tujuan dilakukannya pengujian hipotesis adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan tentang kebenaran dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Terdapat tiga pengujian hipotesis dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Dalam uji F ini, tingkat signifikansi sebesar 5%, apabila nilai signifikansi koefisien regresi dari variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, machiavelliaism, dan pengetahuan pajak) lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen (persepsi mengenai etika atas

penggelapan dan penghindaran pajak). Sebaliknya, jika nilai signifikan koefisien regresi variabel independen lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang di aplikasikan pada penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2011:98). Dalam uji t ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%. Apabila nilai-nilai signifikansi koefisien regresi dari variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, *Machiavellianism*, dan pengetahuan perpajakan) lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (persepsi mengenai etika atas penggelapan dan penghindaran pajak). Sebaliknya, jika nilai signifikan koefisien regresi variabel independen lebih dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal tersebut menunjukan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dapat juga dikatakan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hasilnya signifikan dan H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data Hasil *Pilot Test*

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner yang sebenarnya kepada responden atau objek penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan pilot test untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitas pada setiap item pernyataan pada kuesioner penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang tidak valid dan tidak reliabel sehingga hal tersebut dapat menimbulkan bias dalam penelitian yang sebenarnya. Responden dalam uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini melibatkan 33 responden yaitu pada *guest house* di kota Malang secara acak. Kuesioner yang telah diberikan kepada responden tidak bisa diisi saat hari itu juga. Pihak *guest house* meminta untuk meninggalkan kuesioner untuk beberapa hari dan diambil pada saat waktu yang ditentukan. Beberapa responden tidak paham dengan pernyataan kuesioner dan hal tersebut dijelaskan pada saat pengembalian kuesioner serta diisi pada saat itu juga. Penyebaran kuesioner sampai keseluruhan kembali berlangsung selama 25 hari.

4.1.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner dalam memperoleh data, diperlukan untuk melakukan pengujian validitas dan Reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik instrument dapat digunakan untuk mengukur bagi apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian dilakukan melalui program SPSS dengan menggunakan teknik *Product*

Moment Pearson. Konstruk dikatakan valid apabila memiliki nilai *Pearson Correlation* $> 0,5$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Sedangkan, uji Reliabilitas dalam suatu penelitian digunakan untuk mengetahui seberapa jauh jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghazali (2012:47), uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap pernyataan nya konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$ (lebih dari 0,6). Hasil yang diperoleh untuk uji validitas dan reliabilitas *pilot test* pada kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 4.

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas untuk *pilot test* yang ditampilkan pada Lampiran 4 menunjukkan ada beberapa item pernyataan kuesioner yang tidak valid karena nilai *pearson correlation* pada item-item tersebut bernilai kurang dari 0,5. Pernyataan yang tidak valid dalam uji pilot tes yaitu pada variabel independen *Machiavellianism* (X4) pada item pernyataan nomor 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam). Karena *pearson correlation* pada item pernyataan kuesioner nomor 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) pada variabel *Machiavellianism* tidak memenuhi syarat, maka peneliti memutuskan untuk menghapus item pernyataan yang tidak valid dan reliabel tersebut. Selanjutnya dari pernyataan yang dinyatakan valid akan digunakan untuk uji yang sebenarnya. Adapun item pernyataan tidak valid yang dihapus akan disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pernyataan Kuesioner Tidak Valid

Variabel	No. Item	Pernyataan	Sumber
Machiavellianism (X4)	4	Jika wajib pajak memiliki urusan dalam perpajakan, maka harus selalu diselesaikan di luar prosedur semestinya dan membutuhkan uang yang banyak.	Pratama (2016)
	5	Sebagai wajib pajak kami memiliki pendapat bahwa semua pegawai dirjen pajak memiliki sifat yang keras kepala, memegang teguh prinsip kerja.	
	6	Sebagai wajib pajak kami menghindari pembayaran pajak karena banyak orang merasa penyelewengan pajak masih banyak terjadi.	

Sumber: Data primer, diolah, 2017

4.1.2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.1 uji *pilot test* di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* menunjukkan nilai > 0.6 . Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$ dan setiap item pernyataan pada variabel pada saat *pilot test* dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang reliabel.

4.2. Deskripsi Objek Penelitian

4.2.1. Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan berupa hotel yang terdaftar di Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian ini melakukan pengumpulan data berupa

penyebaran kuesioner kepada bagian manajemen di setiap hotel yang menjadi anggota PHRI Kota Malang secara langsung kepada setiap hotel. Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 54 Kuesioner. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh atau dengan istilah lain sensus. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel jika seluruh populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016: 85). Metode sampling jenuh dipilih karena dalam penelitian ini keseluruhan populasi hanya berjumlah 54 responden dan semuanya digunakan sebagai sampel.

Peneliti melakukan pengumpulan data kurang lebih selama 1 bulan 12 hari yang dimulai pada tanggal 4 September sampai 16 Oktober 2017 dengan menyerahkan kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner diserahkan kepada bagian *front office* hotel yang akan disampaikan kepada pihak *Human Resource Department* (HRD) untuk diserahkan ke bagian manajemen hotel. Jumlah keseluruhan kuesioner yang dibagikan adalah sebanyak 54 kuesioner. Dari keseluruhan jumlah kuesioner yang dibagikan, yang dikembalikan oleh responden berjumlah 41 kuesioner. Menurut Sivo *et al* (2006), standar tingkat pengembalian kuesioner adalah sebesar 70% hingga 80%. Tingkat pengembalian kuesioner dalam penelitian ini sebesar 75% dan hasil tersebut di atas persentase tingkat pengembalian yang baik menurut Sivo *et al* (2006) yaitu di atas 70%. Hasil penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Penyebaran Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang disebar	54	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	13	24%
3	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0
4	Tingkat pengembalian kuesioner	41	75%
5	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	41	75%

Sumber: Data Primer, diolah, 2017

4.3. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari 41 responden yang merupakan wajib pajak hotel yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Kota Malang. Data mengenai karakteristik responden ditampilkan pada tabel 4.4 di bawah ini dan menjelaskan mengenai data responden berdasarkan persentase jabatan responden, jenis wajib pajak, jenis usaha, penghasilan kena pajak, kategori omset, dan kategori kelas hotel yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Statistik Responden

Kategori	Deskripsi	Jumlah	Persentase (%)
Jabatan responden	Direktur/direksi	1	2%
	Manajer	18	44%
	Supervisor	13	32%
	Staf/karyawan	10	24%
	Lainnya	0	0
jenis wajib pajak	WPOP	4	10%
	Wajib Pajak Badan	37	90%

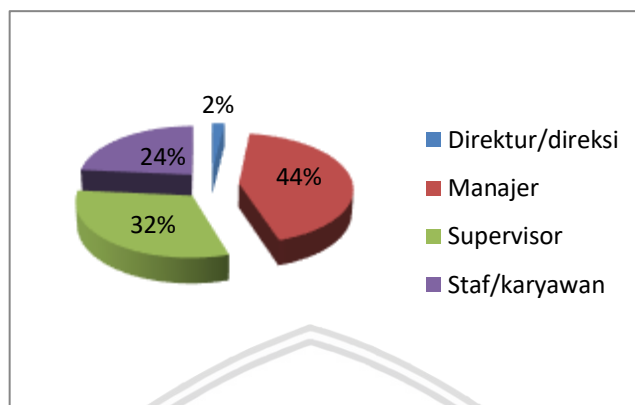
Tabel 4.4 (Lanjutan)
Data Statistik Responden

jenis usaha	Jasa	41	100%
	Manufaktur	0	0
	Usaha dagang	0	0
	Lainnya	0	0
penghasilan kena pajak	Ya	38	93%
	Tidak	3	7%
kategori omset	< 4,8 Miliar	41	100%
	>4,8 Miliar	0	0
kategori kelas hotel	Melati	13	32%
	<i>Guest House</i>	1	3%
	Hotel Bintang 1	2	5%
	Hotel Bintang 2	5	12%
	Hotel Bintang 3	14	34%
	Hotel Bintang 4	5	12%
	Hotel Bintang 5	1	3%
	Lainnya	0	0

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Tabel 4.4 di atas menjelaskan mengenai data responden yang dilihat berdasarkan jabatan responden, jenis wajib pajak, jenis usaha, penghasilan kena pajak, kategori omset, dan kategori kelas hotel. Data-data di atas menjelaskan identitas wajib pajak hotel yang terdaftar di PHRI Kota Malang Jawa Timur. Di bawah ini pada Gambar 4.1 akan dijelaskan mengenai data responden yang disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

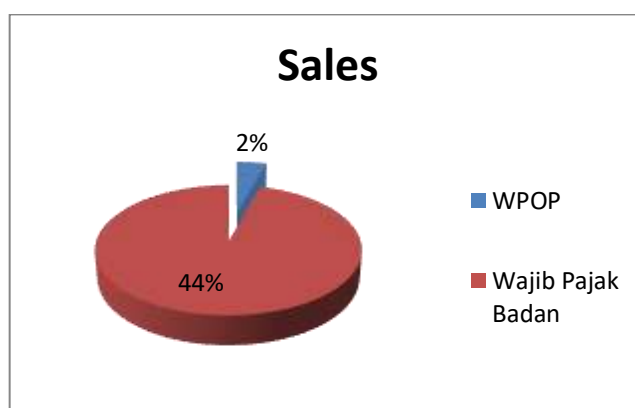
Gambar 4.1
Data Statistik Responden Berdasarkan Jabatan Responden



Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 41 responden, yang mengisi kuesioner berdasarkan jabatan yaitu direktur/direksi berjumlah 1 orang atau 2%. Jumlah responden berdasarkan manajer yaitu sebesar 18 orang atau 44%. Jumlah responden berdasarkan supervisor yaitu sebesar 13 orang atau 32%, sedangkan jumlah responden berdasarkan staf/karyawan yaitu sebesar 10 orang atau 24%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang berdasarkan jabatan di dominasi oleh Manajer.

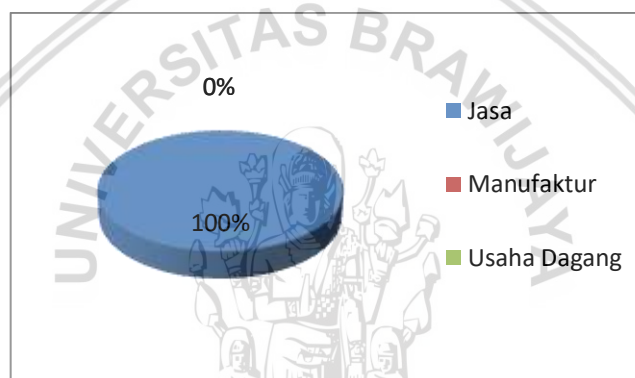
Gambar 4.2
Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak



Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa dari 41 responden, jumlah responden berdasarkan status Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yaitu sebesar 4 responden atau 2%, sedangkan jumlah responden berdasarkan status Wajib Pajak Badan yaitu sebesar 37 responden atau 44%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang mayoritas adalah wajib pajak badan.

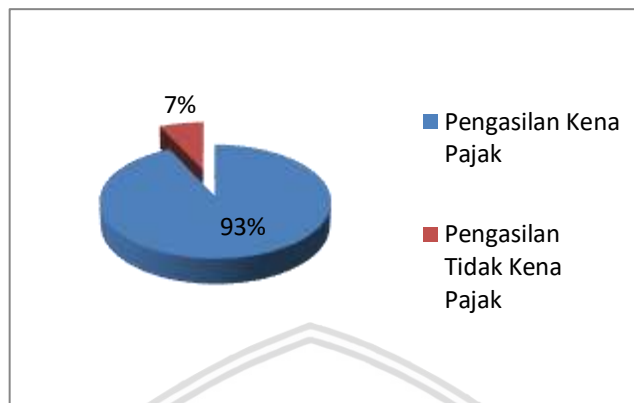
Gambar 4.3
Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Usaha



Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa dari 41 responden, jumlah responden berdasarkan jenis usaha yaitu jasa berjumlah 41 usaha atau 100%, sedangkan manufaktur dan usaha dagang berjumlah 0 tau 0%, karena responden dalam penelitian ini adalah hotel yang tergolong ke dalam jenis usaha jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang berdasarkan jenis usaha di dominasi oleh jenis usaha jasa.

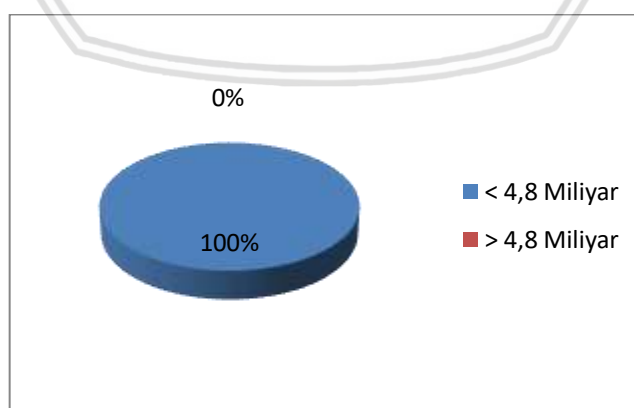
Gambar 4.4
Data Statistik Responden Berdasarkan Status Wajib Pajak



Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas dapat dilihat bahwa dari 41 responden, jumlah responden yang tergolong berdasarkan penghasilan kena pajak yaitu berjumlah 38 responden atau 93%, sedangkan penghasilan tidak kena pajak yaitu sebesar 3 responden atau 7%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang didominasi oleh wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai penghasilan kena pajak (PKP).

Gambar 4.5
Data Statistik Responden Berdasarkan Kategori Omset

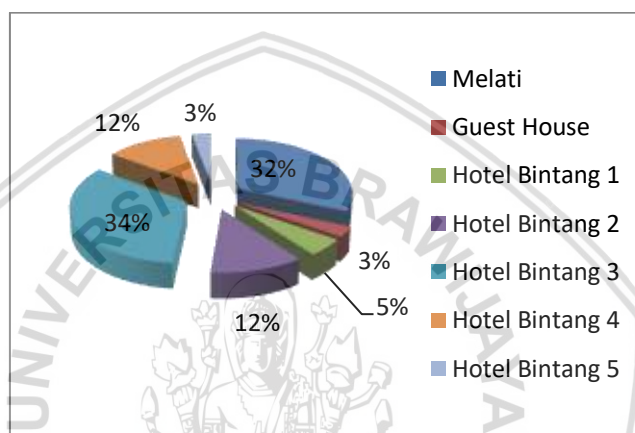


Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan Gambar 4.5 di atas dapat dilihat bahwa dari 41 responden, jumlah responden berdasarkan kategori omset dengan jumlah omset < 4,8 Miliar

sebanyak 41 responden atau 100%, sedangkan jumlah omset > 4,8 Miliar berjumlah 0 responden atau 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang berdasarkan kategori omset yaitu memiliki omset < 4,8 Miliar.

Gambar 4.6
Data Statistik Responden Berdasarkan Kategori Kelas Hotel



Sumber: Data primer, dolah, 2017

Berdasarkan Gambar 4.6 di atas dapat dilihat bahwa dari 41 responden, jumlah responden berdasarkan kategori kelas hotel yaitu kelas melati berjumlah 13 atau 32%, kelas *guest house* 1 atau 3%, kelas hotel bintang 1 berjumlah 2 atau 5%, kelas hotel bintang 2 berjumlah 5 atau 12%, kelas hotel bintang 3 berjumlah 14 atau 34%, kelas hotel bintang 4 berjumlah 5 atau 12%, dan kelas hotel bintang 5 berjumlah 1 atau 3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang berdasarkan kategori kelas hotel didominasi oleh kategori kelas hotel bintang 3.

4.4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif dilakukan atas jawaban dari 41 responden, yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai jawaban responden terhadap

pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Pada bagian ini akan diketahui distribusi atau deskriptif item-item pernyataan dari variabel Keadilan (X1), Sistem Perpajakan (X2), Diskriminasi (X3), *Machiavellianism* (X4), Pengetahuan pajak (X5), dan Persepsi Etika Atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak secara keseluruhan yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner. Deskriptif dari jawaban responden tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Variabel Keadilan (X1)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X1.1	2	4.88	5	12.20	3	7.32	21	51.22	10	24.39	41	100	2.22
X1.2	2	4.88	5	12.20	3	7.32	20	48.78	11	26.83	41	100	2.20
X1.3	2	4.88	5	12.20	4	9.76	22	53.66	8	19.51	41	100	2.29
X1.4	2	4.88	8	19.51	3	7.32	21	51.22	7	17.07	41	100	2.44
X1.5	8	19.51	16	39.02	7	17.07	5	12.20	5	12.20	41	100	3.41
X1.6	4	9.76	25	60.98	1	2.44	6	14.63	5	12.20	41	100	3.41
													2.66

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, terdapat 6 item pernyataan dimana rata-rata responden menjawab netral (3) pada semua item pernyataan yang diajukan. Rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan X1.5 dan X1.6 yaitu masing-masing penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak adil dalam penyusunan undang-undang pajak dan penggelapan pajak dianggap etis, jika aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Rata-rata terendah terdapat pada item pernyataan X1.2 yaitu penggelapan pajak dianggap etis, meskipun dana pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting.

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Perpajakan (X2)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X2.1	2	4.88	15	36.59	10	24.39	9	21.95	5	12.20	41	100	3.00
X2.2	3	7.32	20	48.78	9	21.95	4	9.76	5	12.20	41	100	3.29
X2.3	3	7.32	21	51.22	2	4.88	9	21.95	6	14.63	41	100	3.15
X2.4	0	0.00	16	39.02	7	17.07	14	34.15	4	9.76	41	100	2.85
X2.5	3	7.32	11	26.83	13	31.71	11	26.83	3	7.32	41	100	3.00
													3.06

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, terdapat 5 item pernyataan dimana rata-rata responden menjawab setuju (4) pada semua item pernyataan yang diajukan. Rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan X2.2 yaitu penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan. Rata-rata terendah terdapat pada item pernyataan X2.4 yaitu penggelapan pajak dianggap etis, jika prosedur pembayaran pajak yang ada menyulitkan.

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Variabel Diskriminasi (X3)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X3.1	6	14.63	11	26.83	12	29.27	8	19.51	4	9.76	41	100	3.17
X3.2	5	12.20	5	12.20	17	41.46	10	24.39	4	9.76	41	100	2.93
X3.3	4	9.76	13	31.71	11	26.83	8	19.51	5	12.20	41	100	3.07
X3.4	5	12.20	6	14.63	10	24.39	14	34.15	6	14.63	41	100	2.76
X3.5	5	12.20	18	43.90	13	31.71	5	12.20	0	0.00	41	100	3.56
													3.10

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, terdapat 5 item pernyataan dimana rata-rata responden menjawab setuju (4) pada semua item pernyataan yang diajukan. Rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan X3.5 yaitu tarif pajak untuk usaha dengan omset dibawah 4,8 milyar dikenakan atas peredaran bruto, sedangkan

untuk omset diatas 4,8 miliar dikenakan atas laba, hal ini merupakan bentuk diskriminasi untuk usaha kecil menengah. Rata-rata terendah terdapat pada item pernyataan X3.4 yaitu penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana.

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Variabel *Machiavellianism* (X4)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X4.1	1	2.44	14	34.15	8	19.51	13	31.71	5	12.20	41	100	2.83
X4.2	2	4.88	18	43.90	14	34.15	7	17.07	0	0.00	41	100	3.37
X4.3	2	4.88	9	21.95	15	36.59	15	36.59	0	0.00	41	100	2.95
X4.4	1	2.44	17	41.46	21	51.22	2	4.88	0	0.00	41	100	3.41
X4.5	6	14.63	25	60.98	9	21.95	1	2.44	0	0.00	41	100	3.88
X4.6	2	4.88	11	26.83	20	48.78	8	19.51	0	0.00	41	100	3.17
X4.7	0	0.00	20	48.78	14	34.15	7	17.07	0	0.00	41	100	3.32
													3.28

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, terdapat 7 item pernyataan dimana rata-rata responden menjawab setuju (4) pada semua item pernyataan yang diajukan. Rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan X4.5 yaitu jika sudah menjadi wajib pajak, tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Rata-rata terendah terdapat pada item pernyataan X4.1 yaitu jika diperiksa oleh aparat pajak perihal pajak, sebagai wajib pajak kami akan cenderung untuk mengatakan hal yang disenangi oleh aparat pajak, daripada mengatakan hal yang sejujurnya.

Tabel 4.9

Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Pajak (X5)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X5a.1	1	2.44	27	65.85	12	29.27	1	2.44	0	0.00	41	100	3.68
X5a.2	2	4.88	25	60.98	13	31.71	1	2.44	0	0.00	41	100	3.68
X5a.3	1	2.44	22	53.66	4	9.76	12	29.27	2	4.88	41	100	3.20
X5a.4	3	7.32	21	51.22	5	12.20	12	29.27	0	0.00	41	100	3.37
X5a.5	2	4.88	26	63.41	9	21.95	4	9.76	0	0.00	41	100	3.63
X5a.6	6	14.63	33	80.49	1	2.44	1	2.44	0	0.00	41	100	4.07
X5b.1	8	19.51	13	31.71	1	2.44	18	43.90	1	2.44	41	100	3.22
X5b.2	4	9.76	32	78.05	1	2.44	4	9.76	0	0.00	41	100	3.88
X5b.3	3	7.32	30	73.17	5	12.20	3	7.32	0	0.00	41	100	3.80
X5b.4	2	4.88	23	56.10	8	19.51	6	14.63	2	4.88	41	100	3.41
X5b.5	4	9.76	31	75.61	5	12.20	0	0.00	1	2.44	41	100	3.90
X5C.1	2	4.88	30	73.17	2	4.88	6	14.63	1	2.44	41	100	3.63
X5C.2	1	2.44	11	26.83	8	19.51	21	51.22	0	0.00	41	100	2.80
X5C.3	3	7.32	14	34.15	7	17.07	12	29.27	5	12.20	41	100	2.95
X5C.4	2	4.88	24	58.54	11	26.83	4	9.76	0	0.00	41	100	3.59
X5C.5	3	7.32	12	29.27	11	26.83	14	34.15	1	2.44	41	100	3.05
X5d.1	1	2.44	34	82.93	4	9.76	2	4.88	0	0.00	41	100	3.83
X5d.2	0	0.00	29	70.73	6	14.63	6	14.63	0	0.00	41	100	3.56
X5d.3	6	14.63	17	41.46	4	9.76	14	34.15	0	0.00	41	100	3.37
X5d.4	2	4.88	31	75.61	6	14.63	1	2.44	1	2.44	41	100	3.78
X5d.5	6	14.63	27	65.85	4	9.76	4	9.76	0	0.00	41	100	3.85
X5d.6	9	21.95	22	53.66	8	19.51	2	4.88	0	0.00	41	100	3.93
X5d.7	8	19.51	31	75.61	0	0.00	2	4.88	0	0.00	41	100	4.10
X5d.8	7	17.07	23	56.10	3	7.32	7	17.07	1	2.44	41	100	3.68
													3.58

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, terdapat 24 item pernyataan dimana rata-rata responden menjawab setuju (4) pada semua item pernyataan yang diajukan. Rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan X5d.7 yaitu wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak setelah menerima ketetapan pajak. Rata-rata terendah terdapat pada item pernyataan X5C.2 yaitu penyampaian SPT yang dilakukan oleh wajib pajak hanya dapat disampaikan secara manual.

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Etikas Atas Penghindaran dan
PenggelapanPajak (X4)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
Y1	6	14.63	19	46.34	9	21.95	6	14.63	1	2.44	41	100	3.56
Y2	8	19.51	17	41.46	8	19.51	5	12.20	3	7.32	41	100	3.54
Y3	8	19.51	15	36.59	5	12.20	10	24.39	3	7.32	41	100	3.37
Y4	6	14.63	10	24.39	8	19.51	14	34.15	3	7.32	41	100	3.05
Y5	6	14.63	19	46.34	4	9.76	9	21.95	3	7.32	41	100	3.39
Y6	7	17.07	18	43.90	7	17.07	7	17.07	2	4.88	41	100	3.51
Y7	7	17.07	21	51.22	9	21.95	3	7.32	1	2.44	41	100	3.73
Y8	1	2.44	10	24.39	8	19.51	19	46.34	3	7.32	41	100	2.68
Y9	1	2.44	15	36.59	10	24.39	14	34.15	1	2.44	41	100	3.02
Y10	3	7.32	30	73.17	1	2.44	5	12.20	2	4.88	41	100	3.66
Y11	2	4.88	7	17.07	19	46.34	12	29.27	1	2.44	41	100	2.93
Y12	2	4.88	16	39.02	11	26.83	11	26.83	1	2.44	41	100	3.17
Y13	3	7.32	25	60.98	9	21.95	3	7.32	1	2.44	41	100	3.63
Y14	1	2.44	18	43.90	15	36.59	6	14.63	1	2.44	41	100	3.29
Y15	2	4.88	9	21.95	10	24.39	18	43.90	2	4.88	41	100	2.78
Y16	6	14.63	17	41.46	11	26.83	6	14.63	1	2.44	41	100	3.51
Y17	1	2.44	10	24.39	7	17.07	22	53.66	1	2.44	41	100	2.71
Y18	6	14.63	10	24.39	14	34.15	10	24.39	1	2.44	41	100	3.24
													3.27

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, terdapat 18 item pernyataan dimana rata-rata responden menjawab setuju (4) pada semua item pernyataan yang diajukan. Rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan Y7 yaitu penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah tidak transparan terhadap pengguna uang pajak. Rata-rata terendah terdapat pada item pernyataan Y8 penggelapan pajak dianggap etis jika orang dengan penghasilan yang sama besar maka membayar pajak nya juga sama besar.

4.4.1. Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data bertujuan untuk menguji tingkat keakuratan dan tingkat konsistensi instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji kualitas data ini dilakukan terhadap semua variabel, yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, *Machiavellianism*, pengetahuan pajak, dan persepsi etika atas penhindaran dan penggelapan pajak.

4.4.1.1. Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen penelitian ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan. Nilai *pearson correlation* dalam penelitian ini adalah $> 0,5$. Pernyataan dikatakan valid jika nilai *Pearson Correlation* $> 0,5$ dan signifikansi $< 0,05$. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 6.

4.4.1.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrument penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*. Instrumen penelitian ini dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Hasil uji reliabilitas akan disajikan pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Jumlah Pernyataan	Keterangan
Keadilan (X1)	0.920	6	Reliabel
Sistem Perpajakan (X2)	0.929	5	Reliabel
Diskriminasi (X3)	0.850	5	Reliabel
Machiavellianism (X4)	0.750	7	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X5)	0.921	24	Reliabel
Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak (Y)	0.942	18	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah, 2017

4.4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut lolos dalam uji asumsi klasik (Ningsih, 2015). Pengujian asumsi klasik ini dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak dalam model regresi. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila hasil signifikansi uji *Kolmogorov Smirnov* $> 0,05$. Hasil uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* ditunjukkan pada tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.52478317
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.060
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.547
Asymp. Sig. (2-tailed)		.926

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer, diolah, 2017

Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai signifikansi hasil uji *Kolmogorov Smirnov* bernilai $> 0,05$ yaitu sebesar 0,926. Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa data residual memiliki distribusi normal.

4.4.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linear yang sempurna atau dapat dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Pengujian ini menggunakan nilai VIF untuk mendeteksi masalah multikolinearitas. Jika nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
X1	0.355	2.814
X2	0.370	2.705
X3	0.404	2.476
X4	0.483	2.069
X5	0.603	1.657

Sumber: Data primer, siolah, 2017

Berdasarkan dari Tabel 4.13, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas, yaitu sebagai berikut:

1. *Tolerance* untuk Keadilan adalah 0.355
2. *Tolerance* untuk Sistem Perpajakan adalah 0.370
3. *Tolerance* untuk Diskriminasi adalah 0.404
4. *Tolerance* untuk *Machiavellianism* adalah 0.483
5. *Tolerance* untuk Pengetahuan Pajak adalah 0.603

Pada hasil pengujian diketahui bahwa nilai *tolerance* $> 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas yaitu sebagai berikut:

1. VIF untuk Keadilan adalah 2.814
2. VIF untuk Sistem Perpajakan 2.705
3. VIF untuk Diskriminasi 2.476
4. VIF untuk *Machiavellianism* 2.069

5. VIF untuk Pengetahuan Pajak 1.657

Dari hasil pengujian atas masing-masing variabel bebas tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

4.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

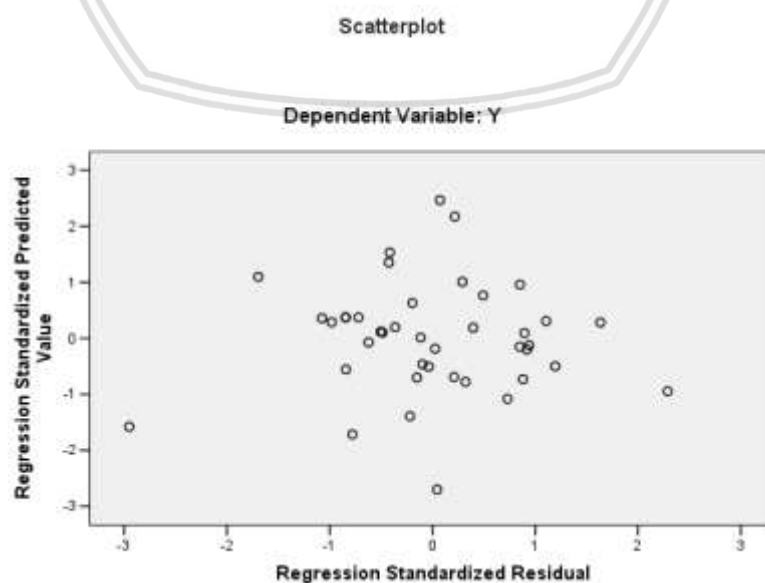
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan kesimpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan uji *scatterplot*. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Ragam sisaan homogen

H_1 : Ragam sisaan tidak homogen

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.7 sebagai berikut:

Gambar 4.7
Hasil *Scatterplot* Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer, diolah, 2017

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam yang homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil seluruh asumsi klasik regresi diatas sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak atau tepat.

4.4.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Keadilan (X_1), Sistem Perpajakan (X_2), Diskriminasi (X_3), *Machiavellianism* (X_4), dan Pengetahuan Pajak (X_5) terhadap variabel terikat yaitu Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak (Y).

4.4.3.1. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS (*Statistical Package for the Social Scienses*) didapat model regresi seperti pada Tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.14
Persamaan Regresi

Variabel Bebas	Unstandardized Coeffisients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	3.605	11.973	
X1	0.761	0.362	0.341
X2	0.029	0.415	0.011
X3	1.013	0.447	0.345
X4	0.081	0.499	0.023
X5	0.291	0.142	0.256

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Model regresi yang digunakan adakah *standardized regression*, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data interval yang pengukurannya menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok. Dalam *standardized regression*, ukuran variabel atau ukuran jawabannya telah disamakan. Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 4.11 adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,341 X_1 + 0,011 X_2 + 0,345 X_3 + 0,023 X_4 + 0,256 X_5$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan meningkat sebesar 0,341 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (Keadilan). Jadi apabila Keadilan mengalami peningkatan 1 satuan, maka Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan meningkat sebesar 0,341 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
2. Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan meningkat sebesar 0,011 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (Sistem Perpajakan), Jadi apabila Sistem Perpajakan mengalami peningkatan 1 satuan, maka Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan meningkat sebesar 0.011 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
3. Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan meningkat sebesar 0,345 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (Diskriminasi), Jadi apabila Diskriminasi mengalami peningkatan 1 satuan, maka Persepsi

Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan meningkat sebesar 0.345 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

4. Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan meningkat sebesar 0,023 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_4 (*Machiavellianism*), Jadi apabila *Machiavellianism* mengalami peningkatan 1 satuan, maka Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan meningkat sebesar 0.023 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
5. Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan meningkat sebesar 0,256 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_5 (Pengetahuan Pajak), Jadi apabila Pengetahuan Pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan meningkat sebesar 0.256 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, *Machiavellianism*, dan Pengetahuan Pajak positif terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak. Dengan kata lain, apabila bahwa Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, *Machiavellianism*, dan Pengetahuan Pajak meningkat maka akan diikuti peningkatan Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak.

4.4.3.2. Koefisien Determinan (R^2)

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Keadilan (X_1), Sistem Perpajakan (X_2), Diskriminasi (X_3), *Machiavellianism* (X_4), dan Pengetahuan

Pajak (X_5)) terhadap variabel terikat (Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak) digunakan nilai R^2 . Nilai R^2 ditunjukkan dalam Tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15
Koefisien Korelasi dan Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0.820	6.673	0.626

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil analisis pada Tabel 4.15 diperoleh hasil *adjusted R²* (koefisien determinasi) sebesar 0,626. Maksudnya adalah 62,6% variabel Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Keadilan (X_1), Sistem Perpajakan (X_2), Diskriminasi (X_3), *Machiavellianism* (X_4), dan Pengetahuan Pajak (X_5)). Sedangkan sisanya 37,4% variabel Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Keadilan (X_1), Sistem Perpajakan (X_2), Diskriminasi (X_3), *Machiavellianism* (X_4), dan Pengetahuan Pajak (X_5) dengan variabel terikat yaitu Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak (Y). Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.820, sehingga nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Keadilan (X_1), Sistem Perpajakan (X_2), Diskriminasi (X_3), *Machiavellianism* (X_4), dan Pengetahuan Pajak (X_5) dengan Persepsi Etika atas

Penghindaran dan Penggelapan Pajak (Y) termasuk kedalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,8-1,0.

4.4.4. Pengujian Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. Pengujian hipotesis termasuk kedalam bagian yang penting dalam suatu penelitian setelah data terkumpul dan diolah.

4.4.4.1. Hipotesis I (F test/serempak)

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi memiliki nilai signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika memiliki hasil yang signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai berikut:

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Tabel 4.16

Uji F / Serempak

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4662.130	5	932	14.409	0.000
Residual	2264.894	35	64.711		
Total	6927.024	40			

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas nilai F hitung sebesar 14,409. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 5 : db residual = 35) adalah sebesar 2,485. Karena F hitung $>$ F tabel yaitu $14,409 > 2,485$ atau nilai Sig. F (0,000) $<$ $\alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak

dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak (Y)) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Keadilan (X_1), Sistem Perpajakan (X_2), Diskriminasi (X_3), *Machiavellianism* (X_4), dan Pengetahuan Pajak (X_5)).

4.4.4.2. Hipotesis II (t test/parsial)

Pengujian t test atau secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah dari masing-masing variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji t / Parsial

Variabel Bebas	t	Sig.	Keterangan
X1	2.102	0.043	Signifikan
X2	0.069	0.945	Tidak Signifikan
X3	2.266	0.030	Signifikan
X4	0.163	0.872	Tidak Signifikan
X5	0.543	0.047	Signifikan

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas telah diperoleh hasil dan akan dibahas sebagai berikut:

1. t test antara X_1 (Keadilan) dengan Y (Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak) menunjukkan t hitung = 2,102 (bertanda positif). Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 35) adalah sebesar 2,030. Karena t hitung > t tabel yaitu $2,102 > 2,030$ atau sig. t (0,043) < $\alpha = 0.05$ maka

pengaruh X_1 (Keadilan) terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan atau dengan meningkatkan Keadilan maka Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan mengalami peningkatan secara nyata.

2. t test antara X_2 (Sistem Perpajakan) dengan Y (Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak) menunjukkan t hitung = 0,069. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 35) adalah sebesar 2,030. Karena t hitung < t tabel yaitu $0,069 < 2,030$ atau sig. t (0,945) > $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X_2 (Sistem Perpajakan) terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_2 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak atau dengan meningkatkan Sistem Perpajakan maka Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan mengalami peningkatan secara tidak nyata.
3. t test antara X_3 (Diskriminasi) dengan Y (Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak) menunjukkan t hitung = 2,266 (bertanda positif). Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 35) adalah sebesar 2,030. Karena t hitung > t tabel yaitu $2,266 > 2,030$ atau sig. t (0,030) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X_3 (Diskriminasi) terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak

dan H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi mempengaruhi secara signifikan terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak atau dengan meningkatkan Diskriminasi maka Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan mengalami peningkatan secara nyata.

4. t test antara X_4 (*Machiavellianism*) dengan Y (Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak) menunjukkan t hitung = 0,163 (bertanda positif). Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 35) adalah sebesar 2,030. Karena t hitung < t tabel yaitu $0,163 < 2,030$ atau sig. t (0,872) > $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X_4 (*Machiavellianism*) terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_4 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *Machiavellianism* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak atau dengan meningkatkan *Machiavellianism* maka Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan mengalami peningkatan secara tidak nyata.
5. t test antara X_5 (Pengetahuan Pajak) dengan Y (Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak) menunjukkan t hitung = 2,054. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 35) adalah sebesar 2,030. Karena t hitung > t tabel yaitu $2,054 > 2,030$ atau sig. t (0,047) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X_5 (Pengetahuan Pajak) terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_5 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan

Pajak mempengaruhi secara signifikan terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak atau dengan meningkatkan Pengetahuan Pajak maka Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak akan mengalami peningkatan secara nyata.

4.4.4.3. Uji Dominan

Uji dominan dilakukan untuk menentukan variabel independen (X) mana yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Uji tersebut dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (β) antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel dependen adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel independen, disajikan pada tabel peringkat sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji Dominan

Peringkat	Variabel	Koefisien Beta
2	X1	0.341
5	X2	0.011
1	X3	0.345
4	X4	0.023
3	X5	0.256

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.18 di atas, variabel Diskriminasi (X3) adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, variabel Y (Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak) lebih banyak dipengaruhi oleh variabel Diskriminasi (X3). Koefisien yang dimiliki oleh variabel Diskriminasi bertanda positif, hal ini menunjukkan hubungan yang searah sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik variabel Diskriminasi maka

semakin meningkatkan Persepsi Etika atas Etika Penggelapan pajak (Y). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat diskriminasi maka Penghindaran dan Penggelapan pajak dianggap perilaku yang beretika.

4.5. Pembahasan

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dari pengujian hipotesis yang telah diuraikan di atas. Hasil pengujian hipotesis yang telah dijelaskan diatas menguji secara parsial pengaruh variabel independen keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, *Machiavellianism*, dan pengetahuan pajak terhadap variabel dependen yaitu persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.

4.5.1. Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis pertama yaitu Keadilan berpengaruh terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak dinyatakan diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (*t test*) yang tercantum pada Tabel 4.17, variabel keadilan memiliki $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, yaitu $2,102 > 2,030$ atau nilai signifikan $t < \alpha$, yaitu $0,043 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan hasil hipotesis tersebut menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) dan Marlina (2014) yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah keadilan yang ditegakkan, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, hal ini berarti kecenderungannya untuk

melakukan penghindaran dan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Dengan arti lain, jika keadilan yang ditegakkan semakin baik, maka wajib pajak akan menganggap bahwa penggelapan pajak ataupun penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak beretika.

Berkaitan dengan teori keadilan yaitu bahwa keadilan memiliki tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak di suatu Negara, yaitu keadilan dalam penyusunan Undang-undang Pajak, dan keadilan dalam pelaksanaan Undang-undang Pajak. Keadilan dalam penyusunan Undang-undang pajak yang dimaksud adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan pada kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Siahaan, 2010:114). Keadilan sangat penting bagi wajib pajak, sehingga dapat mempengaruhi persepsinya untuk patuh terhadap undang-undang pajak.

Penghindaran dan penggelapan pajak dapat dikatakan etis atau tidak etis tergantung kepada pemerintah dalam menegakan suatu keadilan bagi masyarakat terutama dalam masalah perpajakan. Dengan demikian, jika keadilan ditegakkan maka akan dapat merubah persepsi etika masyarakat mengenai penghindaran dan penggelapan pajak. Nickerson *et. al* (2009) menjelaskan bahwa pemerintah dikatakan adil jika telah melaksanakan tugasnya yaitu salah satunya menggunakan uang pajak untuk keperluan negara dalam memberi kemakmuran warga negaranya.

Selain itu, hasil dalam penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015) yang menunjukkan hasil bahwa keadilan tidak berpengaruh secara negatif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan dalam suatu negara tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam memandang penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis.

4.5.2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Menurut Tjahjono (2005:16) yaitu dari Adam Smith, menyatakan bahwa pemungutan pajak atau sistem perpajakan hendaknya didasarkan oleh empat asas yaitu, *equality/equity*, *certainly*, *convenience of payment*, dan *economy*. Jadi sistem perpajakan yang baik adalah yang memenuhi empat asas tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis kedua yaitu Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak dinyatakan ditolak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (*t test*) yang tercantum pada Tabel 4.17, variabel sistem perpajakan memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,069 < 2,030$ atau nilai signifikan $t > \alpha$, yaitu $0,945 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_2 di tolak. Berdasarkan hasil hipotesis tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2014) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak.

Selain itu, hasil dalam penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015) dan Rahman (2013) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Yang menyatakan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka akan semakin rendah persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yang dianggap etis. Dengan arti lain, jika sistem perpajakan yang berlaku semakin baik, maka wajib pajak akan menganggap bahwa penggelapan pajak ataupun penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak beretika. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin adil sistem pemungutan pajak, maka wajib pajak akan cenderung tidak melakukan kecurangan termasuk penghindaran dan penggelapan pajak.

4.5.3. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Hasibuan (2014) mengenai diskriminasi di bidang perpajakan adalah adanya perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Diskriminasi ini kerap terjadi karena adanya suatu bentuk hubungan istimewa yang dapat menimbulkan ketidakadilan antara satu pihak dengan pihak lain.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis ketiga yaitu Diskriminasi berpengaruh terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak dinyatakan diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (*t test*) yang tercantum pada Tabel 4.17, variabel Diskriminasi memiliki $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, yaitu $2,266 > 2,030$ atau nilai signifikan $t < \alpha$, yaitu $0,030 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima. Berdasarkan hasil hipotesis tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi

berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) dan Ningsih (2015) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak bentuk diskriminasi dalam peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan.

Nickerson *et. al* (2009) menyatakan bahwa diskriminasi terjadi apabila pemerintah menerapkan kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan disisi lain terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, dengan adanya diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak akan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.

4.5.4. Pengaruh *Machiavellianism* Terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Pratama (2016) mendefinisikan bahwa seseorang yang memiliki sifat *Machiavellianism* akan menganggap bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan hal yang wajar atau biasa saja. Sehingga sifat *Machiavellianism* dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis keempat yaitu *Machiavellianism* berpengaruh terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak dinyatakan ditolak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (t-

test) yang tercantum pada Tabel 4.17, variabel *Machiavellianism* memiliki t hitung $< t$ tabel, yaitu $0,163 < 2,030$ atau nilai signifikan $t > \alpha$, yaitu $0,872 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_4 diterima. Berdasarkan hasil hipotesis tersebut menunjukkan bahwa *Machiavellianism* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) yang menunjukkan hasil bahwa *Machiavellianism* berpengaruh positif terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Dalam hal ini yang berarti bahwa semakin tinggi *Machiavellianism* yang dimiliki oleh wajib pajak, maka cenderung akan menganggap penghindaran dan penggelapan pajak sebagai perilaku yang beretika.

4.5.5. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Pemahaman atau pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman yang berkaitan dengan prosedur tatacara pembayaran pajak. Pengetahuan tentang perpajakan dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai penghindaran dan penggelapan pajak, karena seseorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pajak dapat memahami perbedaan antara kedua konsep tersebut. Sedangkan seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang rendah akan berpikir bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan hal yang sama yaitu perilaku yang negatif (Pratama, 2016).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis kelima yaitu pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan

Pajak dinyatakan diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (*t test*) yang tercantum pada Tabel 4.17, variabel pengetahuan pajak memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,054 > 2,030$ atau nilai signifikan $t < \alpha$, yaitu $0,047 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_5 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Kusmuriyanto (2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak seseorang atau wajib pajak maka penghindaran dan penggelapan pajak semakin dianggap beretika.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara negatif terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak seseorang atau wajib pajak tidak akan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penghindaran dan penggelapan pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak (Studi pada wajib pajak badan hotel yang terdaftar pada PHRI Kota Malang). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, *Machiavellianism*, dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hasil penelitian telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS dengan jumlah responden sebesar 41 wajib pajak badan yang terdaftar di PHRI Kota Malang. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, maka dapat diambil kesimpulan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keadilan berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keadilan yang ada dan yang telah dirasakan memberikan pengaruh kepada wajib pajak mengenai persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Dalam penelitian ini responden merasa bahwa penghindaran dan penggelapan pajak dianggap tidak beretika jika keadilan yang diberikan oleh pemerintah sudah baik. Maka dalam hal ini keadilan yang diberikan pemerintah sangatlah penting.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang berlaku tidak

3. mempengaruhi persepsi wajib pajak atas penghindaran dan penggelapan pajak. Dalam penelitian ini, responden menunjukkan bahwa penghindaran dan penggelapan pajak dianggap tidak beretika meskipun sistem perpajakan tersebut sudah baik ataupun belum baik. Hal ini dikarenakan bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara, sehingga penghindaran dan penggelapan pajak dianggap tidak etis, terlepas dari alasan wajib pajak melakukan penghindaran dan penggelapan pajak.
4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat diskriminasi yang dilakukan pemerintah terkait perpajakan dapat mempengaruhi persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Wajib pajak akan menganggap penghindaran dan penggelapan pajak suatu perilaku yang beretika, jika tingkat diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah tinggi.
5. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, *Machiavellianism* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sifat *Machiavellianism* yang dimiliki wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Dalam hal ini juga bisa dikatakan bahwa sifat *Machiavellianism* yang dimiliki wajib pajak rendah.
6. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat

mempengaruhi persepsi etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka wajib ajak akan menganggap bahwa perilaku penghindaran dan penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang beretika.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sebagaimana sekaligus dapat memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan dalam data wajib pajak yang diperoleh peneliti, dimana data yang diperoleh hanya sebatas pada jumlah wajib pajak badan hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang Jawa Timur. Serta cakupan wilayah yang kurang luas, yaitu hanya di kota Malang yang diharapkan bisa mencakup malang raya.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mendapatkan data wajib pajak badan hotel yang tidak hanya terdaftar sebagai anggota PHRI Kota Malang, namun menambah wajib pajak badan hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian yaitu tidak hanya cakupan Kota Malang saja, namun pada cakupan wilayah Malang raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, D, M, Trimurti, dan Suhendro. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta. *Journal of Economic and Economic Education*. Vol. 4 No. 2: 177 -191
- Ariyanti, F. 2013. *Pengusaha UKM Masih Ingkar Janji Bayar Pajak*. (<http://bisnis.liputan6.com/read/778782/pengusaha-ukm-masih-ingkarjanjibayar-pajak>), diakses 2 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Realisasi Penerimaan Negara 2007-2017. Diakses 2 Desember 2016 dari <https://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1286>
- Christian K, I. 2010. Perbedaan Penghindaran Pajak Dengan Penggelapan Pajak. Diakses pada 31 Januari 2016 dari <http://konsultasibelajarpajak.blogspot.com/2010/01/perbedaanpenghindaranpajakdengan.html>
- Danandjaja, James. 2003. *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2015. Penanganan Faktur Pajak Fiktif Telah Mencapai Bagian Timur Pulau Jawa. Diakses pada 23 Januari 2017 dari <http://www.pajak.go.id/content/penangananfaktur-pajakfiktif-telahmencapai-bagian-timur-pulau-jawa>
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, I. 2001. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Raya, P.S. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). (Studi Empiris di Kpp Pratama Medan-Polonia). Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara
- Hutami, S. 2010. *Tax Planning (Tax Avoidance Dan Tax Evasion)* Dilihat Dari Teori Etika. *Politeknosains*. Vol. IX No. 2
- Infopajak.id: Informasi Seputar Pajak. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Diakses pada 25 Oktober 2017 dari <http://www.infopajak.id/penghindaran-pajak-taxavoidance-dan-penggelapan-pajak-tax-evasion-oleh-wajib-pajak/>

- Izza, Ika Alfi Nur dan Ardi Hamzah. 2009. Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XII Palembang.
- Jogiyanto, H. M. 2016. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman pengalaman. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE
- Kementrian Keuangan. 2011. Laporan Keuangan Kementrian Keuangan RI TA 2011 Audited. Diakses pada 20 November 2016 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan-keuangan-kementerian-keuangan-ta-2011>
- Kementrian Keuangan. 2012. Laporan Keuangan Kementrian Keuangan RI TA 2012 Audited. Diakses pada 20 November 2016 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan-keuangankementerian-keuangan-ta-2012>
- Kementrian Keuangan. 2013. Laporan Keuangan Kementrian Keuangan RI TA 2013 Audited. Diakses pada 20 November 2016 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan-keuangankementerian-keuangan-ta-2013>
- Kementrian Keuangan. 2014. Laporan Keuangan Kementrian Keuangan RI TA 2014 Audited. Diakses pada 20 November 2016 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan-keuangan-kementerian-keuangan-ta-2014>
- Kementrian Keuangan. 2015. Laporan Keuangan Kementrian Keuangan RI TA 2015 Audited. Diakses pada 20 November 2016 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan-keuangan-kementerian-keuangan-ta-2015>
- Keraf, Sonny. A. 1998. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius
- Kotte, Carolina, Jeniwanti. 2016. Pengaruh Pengetahuan Konsep Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Penelitian Skripsi*. Hal 107
- Kurniawati, M. dan Toly, Agus, A. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Journal Tax & Accounting*. Vol . IV No. 2

- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun (2011). Direktorat Jenderal Pajak 2011. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 dari <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2011>
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun (2012). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak 2012. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 7 dari <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2012>
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun (2013). Direktorat Jenderal Pajak 2013. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 dari <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2013>
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun (2014). Direktorat Jenderal Pajak 2014. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 dari <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2014>
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun (2015) Direktorat Jenderal Pajak 2015. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 dari <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2015>
- Lestari, Wahyu dan Kusmuriyanto. 2015. Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*. Vol. IV No. 4: 3-4
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mukhararoh, A. H. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Di Kota Semarang). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Nickerson, I., Pleshko, L., McGee, R. W. 2009. Presenting The Dimensionality Of An Ethics Scale Pertaining To Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. Volume XII, Nomor 1; 1-14.
- Ningsih, Cahaya. 2015. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Panggabean, Rosa. 2015. Faktur Pajak Fiktif Jawa Timur Capai Rp 375 Miliar. Diakses pada 23 Januari 2017 dari <https://bisnis.tempo.co/read/675932/faktur-pajak-fiktif-jawa-timur-capai-rp-375-miliar>
- Prameswari, Difinta. 2008. Pengaruh Pengetahuan Konsep Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

- Prasetyo, S. 2010. Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta. *Skripsi*. Surakarta: Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret.
- Pratama, Arie. 2016. Machiavellianism, Tax Knowledge, and Ethical Perception on Tax Avoidance and Evasion: Survey on Undergraduate Students in West Java, Indonesia. *SIBR 2016 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research Bangkok*. Hal. 2-12
- Pratama, Arie. 2017. Machiavellianism, Perception on Tax Administration, Religiosity and Love of Money Toward Tax Compliance: Exploratory Survey on Individual Taxpayers in Bandung City Indonesia. *International Journal Economics and Business Research*. Vol 14; 358-359
- Rachmadi, W. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rahman, Irma, Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengnai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat
- Ridwan, Ahmad. 2014. Sensitivitas Etika Wajib Pajak atas Tax Evasion. *SNA 17 Mataram*. Hal. 4-5
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat
- Setiawan, Budi, Agus. 2011. Pengaruh Sifat Machiavellian dan Perkembangan Moral Terhadap Dysfunctional Behavior (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Diponegoro Semarang). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, E. 2016. *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sumarsan, T. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Indeks Permata Puri Media.

- Suminarsasi, W. & Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Tesis*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Magister Sains Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Syopiansyah Jaya Putra dan DurrachamanYusuf. 2009. “*Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*”. Jakarta.
- Tjahjono, Achmad dan Husein. 2005. *Perpajakan*. Edisi 3. UPP AMP YKPN.
- Usman, Amelia, R. 2017. Pengaruh Penerapan Sunset Policy Pbb Perkotaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bekerja Di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Pajak, Dan Kantor Jasa Penilai Publik Di Kota Malang). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Yetmi, Y. S, Durmayanti, Y, dan Muslim, R. Y. 2014. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol. IV No. 1
- Yuliana dan Cahyonowati, N. 2012. Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, Dan Keputusan Etis Terhadap Niat Berpartisipasi Dalam Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Konsultan Pajak Di Semarang). *Journal of Accounting*. Vol. I No. 1
- Yuliani, S. D, Kadarisma Hidayat, Topowijono. 2015. Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*. Vol. 1 No. 1 Hal. 4-5

Lampiran 1: Pernyataan Kuesioner



KUESIONER PENELITIAN

Kepada,

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i

Di Tempat

Saya Aryo Sumarsono Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang saat ini sedang melakukan penelitian dalam bidang perpajakan dalam konteks dimensi persepsi mengenai etika atas penghindaran dan penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih kelulusan di jenjang pendidikan Strata Satu (S1).

Peneliti sangat menjaga rahasia individu atau kelompok karena data yang diolah dalam penelitian ini tidak menunjukkan identitas bagi setiap individu kelompok. Anda adalah responden yang saya pilih menjadi sampel dalam penelitian saya. Semua jawaban yang anda berikan pada kuesioner penelitian ini merupakan murni dari persepsi Anda.

Kesuksesan dalam penelitian ini bergantung pada anda sebagai partisipan dalam mengisi setiap pernyataan-pernyataan pada kuisisioner ini, karena itu saya sangat berharap kerelaan Anda untuk berpartisipasi dan mengisi kuisisioner yang saya lampirkan. Atas bantuan dan kesediaan Anda serta waktu luang yang Anda berikan dalam mengisi kuisisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Malang, 15 April 2017

Peneliti

Aryo Sumarsono

Tax evasion atau yang sering disebut dengan penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk dari perencanaan pajak yang dianggap *illegal* karena melanggar Undang-undang Perpajakan sehingga perbuatan ini dianggap tidak beretika untuk dilakukan. Namun, terdapat beberapa pandangan yang menganggap penggelapan pajak ini merupakan suatu perilaku yang dianggap beretika karena beberapa alasan situasi dan kondisi, seperti adanya ketidakadilan, sistem perpajakan yang buruk, kinerja pemerintah yang kurang baik, adanya diskriminasi dari pemerintah, adanya sifat Machiavelli, serta pengaruh tingkat pengetahuan pada masyarakat tentang perpajakan.

Tax avoidance atau yang sering disebut dengan penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk dari perencanaan pajak yang dianggap *legal* karena tidak melanggar Undang-undang Perpajakan. Akan tetapi, penghindaran pajak tersebut bukan berarti tindakan yang beretika jika dilihat dari sudut pandang masing-masing masyarakat, tergantung persepsi mereka.

Bagian I-Daftar Pernyataan

Tunjukkan tingkat kesetujuan Anda terhadap pernyataan berikut dengan memberi **tanda silang (x)** yang sesuai pada setiap pernyataan, dengan menggunakan skala yang diberikan di bawah ini.

STS : Sangat Tidak Setuju; TS : Tidak Setuju; N : Netral; S : Setuju; SS : Sangat Setuju

1. Keadilan

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1	Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun dana pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting.					
2	Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun dana pajak digunakan dengan baik dan benar.					
3	Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun tarif pajaknya rendah.					
4	Penggelapan pajak dianggap etis, jika orang yang memiliki penghasilan tinggi, maka harus membayar pajak tinggi.					
5	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak adil dalam penyusunan undang-undang pajak.					
6	Penggelapan pajak dianggap etis, jika aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan perpajakan.					

STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: Sangat Setuju

2. Sistem Perpajakan

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1	Penggelapan pajak dianggap etis, jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.					
2	Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan.					
3	Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana.					
4	Penggelapan pajak dianggap etis, jika prosedur pembayaran pajak yang ada menyulitkan.					
5	Penggelapan pajak dianggap etis, jika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan pembayaran pajak.					

STS : Sangat Tidak Setuju; TS : Tidak Setuju; N : Netral; S : Setuju; SS : Sangat Setuju

3. Diskriminasi

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah melakukan diskriminasi atas agama, ras, dan latar belakang budaya.					
2	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah memenjarakan orang karena pendapat politiknya.					
3	Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana.					
4	Penggelapan pajak dianggap etis, jika zakat untuk agama islam digunakan sebagai faktor pengurang pajak.					
5	Tarif pajak untuk usaha dengan omzet dibawah 4,8 milyar dikenakan atas peredaran bruto, sedangkan untuk omzet diatas 4,8 milyar dikenakan atas laba. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi untuk usaha kecil menengah.					

STS : Sangat Tidak Setuju; **TS** : Tidak Setuju; **N** : Netral; **S** : Setuju; **SS** : Sangat Setuju

4. Machiavellianism Perpajakan

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1	Jika diperiksa oleh aparat pajak perihal pajak, sebagai wajib pajak kami akan cenderung untuk mengatakan hal yang disenangi oleh aparat pajak, daripada mengatakan hal yang sejujurnya.					
2	Wajib pajak akan berterus terang pada konsultan dan staf pajaknya untuk menghindari pajak dengan melakukan segala hal yang diperlukan baik itu dibolehkan atau tidak.					
3	Sebagai wajib pajak, kami tidak percaya dengan sistem perpajakan di Indonesia. Kami sebagai wajib pajak akan mematuhi pajak berdasarkan pandangan kami.					

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
4	Sebagai wajib pajak kami merasa bahwa pegawai pajak baik dalam menjalankan tugasnya.					
5	Jika sudah menjadi wajib pajak, Tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban untuk membayar pajak.					
6	Sebagai wajib pajak kami berpendapat bahwa kebanyakan orang akan lebih sedih untuk membayar pajak yang besar daripada ditinggalkan seseorang.					
7	Sebagai wajib pajak kami berpendapat bahwa wajib pajak tidak ada yang rela membayar pajak pada Negara. mereka terpaksa melakukannya.					

STS : Sangat Tidak Setuju; **TS** : Tidak Setuju; **N** : Netral; **S** : Setuju; **SS** : Sangat Setuju

5. Pengetahuan Pajak

a. Perhitungan Pajak

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1	Prinsip perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah Economy, Equality, Egaliter.					
2	Negara Indonesia menerapkan sistem perpajakan yang dinamakan self assessment system.					
3	Negara Indonesia memiliki tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan sebesar 25%.					
4	Seluruh orang atau badan yang menjadi wajib pajak maka wajib memungut PPN.					
5	Dasar dalam melakukan perhitungan PPN yaitu adalah nilai jual, nilai ekspor, dan nilai impor.					

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
6	Wajib pajak hotel dan restoran termasuk ke dalam objek pajak kabupaten/kota.					

STS : Sangat Tidak Setuju; **TS** : Tidak Setuju; **N** : Netral; **S** : Setuju; **SS** : Sangat Setuju

b. Pembayaran Pajak

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1	Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak hanya dilakukan di kantor pajak.					
2	Untuk melakukan penyetoran pajak, wajib pajak harus melampirkan SPT pajak.					
3	Wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dapat dilakukan kapanpun.					
4	Wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi 2% per tahun.					
5	Wajib pajak diperbolehkan mengajukan penundaan pembayaran pajak yang disebabkan oleh ketidakmampuan bayar pajak.					

STS : Sangat Tidak Setuju; **TS** : Tidak Setuju; **N** : Netral; **S** : Setuju; **SS** : Sangat Setuju

c. Pelaporan Pajak

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1	Terdapat 3 (tiga) jenis SPT yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yaitu masa, tahunan, dan bulanan.					
2	Penyampaian SPT yang dilakukan oleh wajib pajak hanya dapat disampaikan secara manual.					
3	Denda keterlambatan penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan adalah Rp 1.000.000					
4	Wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT dapat dilakukan kapan saja.					
5	Wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT dikenakan sanksi pembetulan SPT sebesar 2% per bulan.					

STS : Sangat Tidak Setuju; **TS** : Tidak Setuju; **N** : Netral; **S** : Setuju; **SS** : Sangat Setuju

d. Prosedur Pajak

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1	NPWP untuk karyawan dibuat paling lama dibulan ketika karyawan bekerja.					
2	Bagi karyawan yang sudah tidak bekerja, NPWP dapat dihapuskan.					
3	Semua wajib pajak akan mengalami pemeriksaan pajak.					
4	Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dapat disampaikan pada pengadilan pajak.					
5	Apabila wajib pajak tidak terima dengan hasil banding, maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.					
6	Semua wajib pajak melakukan pembukuan/pencatatan.					
7	Wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak setelah menerima ketetapan pajak.					
8	Penagihan pajak untuk wajib pajak dapat dilakukan hingga penyitaan harta benda wajib pajak.					

STS : Sangat Tidak Setuju; TS : Tidak Setuju; N : Netral; S : Setuju; SS : Sangat Setuju

6. Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1	Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajaknya terlalu tinggi.					
2	Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara.					
3	Penggelapan pajak dianggap etis, jika saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang dibayarkan.					
4	Penggelapan pajak dianggap etis untuk dilakukan jika hukum yang ada lemah.					
5	Penggelapan pajak dianggap etis, jika terdapat diskriminasi dalam perpajakan.					
6	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintahnya korupsi.					

7	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak transparan terhadap penggunaan uang pajak.					
8	Penggelapan pajak dianggap etis, jika orang dengan penghasilan yang sama besar maka membayar pajaknya juga sama besar.					

STS : Sangat Tidak Setuju; **TS** : Tidak Setuju; **N** : Netral; **S** : Setuju; **SS** : Sangat Setuju

7. Persepsi Etika Atas Penghindaran Pajak

No.	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) N	(4) S	(5) SS
1	Penghindaran pajak dianggap etis karena merupakan hak wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak.					
2	Tidak semestinya wajib pajak menghindari pajak, baik secara legal maupun illegal.					
3	Penghindaran pajak dianggap etis meskipun wajib pajak tidak memahami dengan benar peraturan perpajakan yang berlaku.					
4	Wajib pajak tidak perlu merasa bersalah jika penerimaan pajak Negara tidak tercapai akibat penghindaran pajak.					
5	Wajib pajak yang menghindari pajak pantas untuk diberikan sanksi perpajakan.					
6	Penghindaran pajak dianggap etis jika tariff pajak tinggi.					
7	Penghindaran pajak dianggap etis jika semua orang melakukannya.					
8	Penghindaran pajak dianggap etis jika pengelolaan pendapatan Negara belum baik, sehingga di temukan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara.					
9	Penghindaran pajak dianggap etis jika sanksi yang diberikan kecil.					
10	Penghindaran pajak dianggap etis jika sebagian uang yang diserahkan untuk pajak digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menguntungkan bagi wajib pajak.					

STS : Sangat Tidak Setuju; **TS** : Tidak Setuju; **N** : Netral; **S** : Setuju; **SS** : Sangat Setuju

Bagian II-Karakteristik Responden

Mohon diisi semua pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang paling sesuai.
Silahkan memberi **tanda silang (X)** untuk pertanyaan pilihan.

1. Nama Usaha :
2. Jabatan Pengisi : ☐ Direktur/ Direksi ☐ Manajer ☐ Supervisor
☐ Staf/ Karyawan ☐ Lainnya:
3. Jenis Wajib Pajak : ☐ Wajib Pajak Orang Pribadi
☐ Wajib Pajak Badan
4. Jenis Usaha : ☐ Jasa ☐ Manufaktur ☐ Usaha Dagang
☐ Lainnya:
5. Penghasilan Kena Pajak : ☐ Ya ☐ Tidak
6. Katagori Omset : ☐ < 4,8 Miliyar ☐ > 4,8 Miliyar
7. Katagori Kelas
* (Khusus Hotel) : ☐ Melati ☐ Guest House ☐ Hotel Bintang 1
☐ Hotel Bintang 2 ☐ Hotel Bintang 3
☐ Hotel Bintang 4 ☐ Hotel Bintang 5
☐ Lainnya:

Lampiran 2: Penyesuaian pernyataan kuesioner

Penyesuaian Pernyataan Kuesioner

Variabel	No. Item	Pernyataan	Perubahan	Sumber
<i>Machiavellianism</i>	1	Jika diperiksa oleh aparat pajak dalam perihal pajak, saya cenderung untuk mengatakan hal yang disenangi oleh aparat pajak, daripada mengatakan hal yang sejujurnya.	Jika diperiksa oleh aparat pajak perihal pajak, sebagai wajib pajak kami akan cenderung untuk mengatakan hal yang disenangi oleh aparat pajak, daripada mengatakan hal yang sejujurnya.	Pratama (2016)
	2	Saya akan berterus terang kepada konsultan pajak saya untuk menghindari ajak dengan melakukan segala hal yang diperlukan untuk itu baik dibolehkan atau tidak.	Wajib pajak akan berterus terang pada konsultan dan staf pajaknya untuk menghindari pajak dengan melakukan segala hal yang diperlukan baik itu dibolehkan atau tidak.	
	3	Saya tidak percaya dengan sistem perpajakan Indonesia. Saya mematuhi pajak berdasarkan pandangan pribadi saya.	Sebagai wajib pajak, kami tidak percaya dengan sistem perpajakan di Indonesia. Kami sebagai wajib pajak akan mematuhi pajak berdasarkan pandangan kami.	
	4	Urusan perpajakan harus selalu diselesaikan diluar prosedur semestinya dan membutuhkan uang yang banyak.	Jika wajib pajak memiliki urusan dalam perpajakan, maka harus selalu diselesaikan diluar prosedur semestinya dan membutuhkan uang yang banyak.	
	5	Saya berpendapat bahwa semua pegawai dirjen pajak memiliki sifat yang keras kepala, memegang teguh prinsip kerja.	Sebagai wajib pajak kami memiliki pendapat bahwa semua pegawai dirjen pajak memiliki sifat yang keras kepala, memegang teguh prinsip kerja.	

Penyesuaian Pernyataan Kuesioner (Lanjutan)

Variabel	No. Item	Pernyataan	Perubahan	Sumber
	6	Saya menghindari pembayaran pajak karena banyak orang merasa penyelewengan pajak masih banyak terjadi.	Sebagai wajib pajak kami menghindari pembayaran pajak karena banyak orang merasa penyelewengan pajak masih banyak terjadi.	Pratama (2016)
	7	Saya merasa bahwa pegawai pajak baik dalam menjalankan tugasnya.	Sebagai wajib pajak kami merasa bahwa pegawai pajak baik dalam menjalankan tugasnya.	
	8	Tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban pajak jika sudah menjadi wajib pajak	Jika sudah menjadi wajib pajak, Tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban untuk membayar pajak.	
	9	Saya berpendapat bahwa kebanyakan orang akan lebih sedih membayar pajak yang besar daripada ditinggalkan seseorang	Sebagai wajib pajak kami berpendapat bahwa kebanyakan orang akan lebih sedih untuk membayar pajak yang besar daripada ditinggalkan seseorang.	
	10	Saya berpendapat bahwa wajib pajak tidak ada yang rela membayar pajak pada negara, mereka terpaksa melakukannya	Sebagai wajib pajak kami berpendapat bahwa wajib pajak tidak ada yang rela membayar pajak pada Negara. mereka terpaksa melakukannya.	
Pengetahuan Pajak (perhitungan Pajak) (X5)	1	Prinsip perpajakan menurut Adam Smith adalah Economy, Equality, Egaliter.	Prinsip perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah Economy, Equality, Egaliter.	
	2	Sistem perpajakan di Indonesia adalah self assessment.	Negara Indonesia menerapkan sistem perpajakan yang dinamakan self assessment system.	
	3	Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia adalah 25%.	Negara Indonesia memiliki tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan sebesar 25%.	

Penyesuaian Pernyataan Kuesioner (Lanjutan)

Variabel	No. Item	Pernyataan	Perubahan	Sumber
Pengetahuan Pajak (pembayaran pajak) (X5)	4	Seluruh wajib pajak wajib memungut PPN.	Seluruh orang atau badan yang menjadi wajib pajak maka wajib memungut PPN.	Pratama (2016)
	5	Dasar perhitungan PPN adalah nilai jual, nilai ekspor, dan nilai impor.	Dasar dalam melakukan perhitungan PPN yaitu adalah nilai jual, nilai ekspor, dan nilai impor.	
	6	Pajak hotel dan restoran termasuk pajak kabupaten/kota.	Wajib pajak hotel dan restoran termasuk ke dalam objek pajak kabupaten/kota.	
	1	Pembayaran pajak dilakukan di kantor pajak.	Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak hanya dilakukan di kantor pajak.	
	2	Penyetoran pajak dilampirkan dengan SPT pajak.	Untuk melakukan penyetoran pajak, wajib pajak harus melampirkan SPT pajak.	
	3	Pembayaran pajak dapat dilakukan kapanpun	Wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dapat dilakukan kapanpun.	
	4	Keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi 2% per tahun.	Wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi 2% per tahun.	
	5	Diperbolehkan mengajukan penundaan pembayaran pajak disebabkan oleh ketidakmampuan bayar pajak.	Wajib pajak diperbolehkan mengajukan penundaan pembayaran pajak yang disebabkan oleh ketidakmampuan bayar pajak.	

Penyesuaian Pernyataan Kuesioner (Lanjutan)

Variabel	No. Item	Pernyataan	Perubahan	Sumber
Pengetahuan Pajak (pelaporan pajak) (X5)	1	SPT terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu masa, tahunan, dan bulanan.	Terdapat 3 (tiga) jenis SPT yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yaitu masa, tahunan, dan bulanan.	Pratama (2016)
	2	Penyampaian SPT hanya dapat disampaikan secara manual.	Penyampaian SPT yang dilakukan oleh wajib pajak hanya dapat disampaikan secara manual.	
	3	Denda keterlambatan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Rp 50.000.	Denda keterlambatan penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan adalah Rp 1.000.000	
	4	Pembetulan SPT dapat dilakukan kapan saja.	Wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT dapat dilakukan kapan saja.	
	5	Sanksi pembetulan SPT adalah denda Rp 10.000.000.	Wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT dikenakan sanksi pembetulan SPT sebesar 2% per bulan.	
Pengetahuan Pajak (Prosedur pajak) (X5)	1	NPWP karyawan dibuat paling lama dibulan ketika karyawan bekerja.	NPWP untuk karyawan dibuat paling lama dibulan ketika karyawan bekerja.	
	2	Jika sudah tidak bekerja, NPWP dapat dihapuskan.	Bagi karyawan yang sudah tidak bekerja, NPWP dapat dihapuskan.	
	3	Semua wajib pajak akan mengalami pemeriksaan pajak.	Semua wajib pajak akan mengalami pemeriksaan pajak.	
	4	Keberatan wajib pajak disampaikan pada pengadilan pajak.	Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dapat disampaikan pada pengadilan pajak.	
	5	Apabila wajib pajak tidak terima hasil banding, maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung	Apabila wajib pajak tidak terima dengan hasil banding, maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.	

Penyesuaian Pernyataan Kuesioner (Lanjutan)

Variabel	No. Item	Pernyataan	Perubahan	Sumber
	6	Semua wajib pajak melakukan pembukuan/pencatatan.	Semua wajib pajak melakukan pembukuan/pencatatan.	
	7	Wajib pajak baru membayar pajak setelah menerima ketetapan pajak.	Wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak setelah menerima ketetapan pajak.	
	8	Penagihan pajak dapat dilakukan hingga penyitaan harta benda wajib pajak.	Penagihan pajak untuk wajib pajak dapat dilakukan hingga penyitaan harta benda wajib pajak.	
	4	Penggelapan pajak dilakukan karena hukum yang ada lemah.	Penggelapan pajak dianggap etis untuk dilakukan jika hukum yang ada lemah.	
	9	Penghindaran pajak adalah hak wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak.	Penghindaran pajak dianggap etis karena merupakan hak wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak.	
	11	Wajib pajak yang menghindari pajak tidak perlu memahami dengan benar peraturan perpajakan yang berlaku.	Penghindaran pajak dianggap etis meskipun wajib pajak tidak memahami dengan benar peraturan perpajakan yang berlaku.	
	14	Penghindaran pajak pantas dilakukan jika tarif pajak tinggi.	Penghindaran pajak dianggap etis jika tariff pajak tinggi.	
	15	Penghindaran pajak pantas dilakukan jika semua orang melakukannya.	Penghindaran pajak dianggap etis jika semua orang melakukannya.	
	16	Penghindaran pajak pantas dilakukan jika pengelolaan pendapatan Negara belum baik, sehingga di temukan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara.	Penghindaran pajak dianggap etis jika pengelolaan pendapatan Negara belum baik, sehingga di temukan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara.	

Penyesuaian Pernyataan Kuesioner (Lanjutan)

Variabel	No. Item	Pernyataan	Perubahan	Sumber
	17	Penghindaran pajak pantas dilakukan jika sanksi yang diberikan kecil.	Penghindaran pajak dianggap etis jika sanksi yang diberikan kecil.	
	18	Penghindaran pajak pantas dilakukan jika sebagian uang yang diserahkan untuk pajak digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menguntungkan untuk saya.	Penghindaran pajak dianggap etis jika sebagian uang yang diserahkan untuk pajak digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menguntungkan bagi wajib pajak.	

Sumber: Data primer, diolah, 2017



Lampiran 3: Perubahan Pernyataan Identitas Reponden

1. Nama Usaha : _ (Diisi oleh responden)
2. Jabatan Pengisi :
 - a. Direktur/direksi
 - b. Manajer
 - c. Supervisor
 - d. Staf/karyawan
 - e. lainnya
3. Jenis Wajib Pajak :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi
 - b. Wajib Pajak Badan
4. Jenis Usaha :
 - a. Jasa
 - b. Manufaktur
 - c. Usaha Dagang
 - d. lainnya
5. Penghasilan Kena Pajak :
 - a. Ya
 - b. tidak
6. Katagori Omset :
 - a. < 4,8 Miliar
 - b. > 4,8 Miliar
7. Kategori Kelas Hotel :
 - a. Melati
 - b. Guest House
 - c. Hotel Bintang 1
 - d. Hotel Bintang 2
 - e. Hotel Bintang 3
 - f. Hotel Bintang 4
 - g. Hotel Bintang 5
 - h. Lainnya

Lampiran 4: Hasil uji validitas dan reliabilitas *pilot test*

Uji Validitas dan Reliabilitas *Pilot Test*

Variabel	No. Item	Koefisien Validitas	Keterangan	Cronbach Alpha	Keterangan
Keadilan (X1)	1	0,798	VALID	0,828	RELIABEL
	2	0,827	VALID		
	3	0,645	VALID		
	4	0,573	VALID		
	5	0,849	VALID		
	6	0,871	VALID		
Sistem Perpajakan (X2)	1	0,880	VALID	0,922	RELIABEL
	2	0,932	VALID		
	3	0,909	VALID		
	4	0,865	VALID		
	5	0,785	VALID		
Diskriminasi (X3)	1	0,801	VALID	0,803	RELIABEL
	2	0,733	VALID		
	3	0,817	VALID		
	4	0,844	VALID		
	5	0,517	VALID		
Machiavellianism (X4)	1	0,644	VALID	0,770	RELIABEL
	2	0,645	VALID		
	3	0,669	VALID		
	4	0,441	TIDAK VALID		
	5	0,498	TIDAK VALID		
	6	0,493	TIDAK VALID		
	7	0,596	VALID		
	8	0,713	VALID		
	9	0,557	VALID		
	10	0,502	VALID		

Uji Validitas dan Reliabilitas *Pilot Test* (Lanjutan)

Variabel	No. Item	Koefisien Validitas	Keterangan	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X5)	1	0,582	VALID	0,925	RELIABEL
	2	0,688	VALID		
	3	0,688	VALID		
	4	0,568	VALID		
	5	0,640	VALID		
	6	0,711	VALID		
	7	0,528	VALID		
	8	0,539	VALID		
	9	0,634	VALID		
	10	0,530	VALID		
	11	0,560	VALID		
	12	0,606	VALID		
	13	0,536	VALID		
	14	0,608	VALID		
	15	0,594	VALID		
	16	0,717	VALID		
	17	0,634	VALID		
	18	0,643	VALID		
	19	0,541	VALID		
	20	0,603	VALID		
	21	0,765	VALID		
	22	0,563	VALID		
	23	0,580	VALID		
	24	0,651	VALID		

Uji Validitas dan Reliabilitas *Pilot Test* (Lanjutan)

Variabel	No. Item	Koefisien Validitas	Keterangan	Cronbach Alpha	Keterangan
Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak (Y)	1	0,637	VALID	0,934	RELIABEL
	2	0,697	VALID		
	3	0,797	VALID		
	4	0,817	VALID		
	5	0,845	VALID		
	6	0,779	VALID		
	7	0,795	VALID		
	8	0,658	VALID		
	9	0,570	VALID		
	10	0,662	VALID		
	11	0,590	VALID		
	12	0,640	VALID		
	13	0,595	VALID		
	14	0,766	VALID		
	15	0,616	VALID		
	16	0,510	VALID		
	17	0,668	VALID		
	18	0,750	VALID		

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Lampiran 5: Tabulasi Kuesioner Penelitian

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	3	4
1	1	1	1	5	5
1	1	1	2	2	2
3	3	3	4	5	4
2	1	2	4	4	4
2	1	2	3	4	5
2	2	2	1	2	2
2	2	2	2	4	5
2	2	2	2	4	4
1	1	1	1	3	3
2	2	2	2	4	4
1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	5	5
2	2	2	2	4	4
2	2	2	2	2	2
3	3	3	4	5	4
1	1	1	2	2	2
2	2	2	2	3	4
3	3	3	4	5	4
2	2	2	2	4	4
2	2	2	2	3	4
2	2	2	2	4	4
1	1	4	4	1	1
4	4	3	3	4	4
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	4	4
5	5	5	5	5	4
2	2	2	2	3	2
2	2	2	2	3	4
2	2	2	2	2	2
1	2	2	2	4	4
2	2	2	3	4	4
2	2	2	2	4	4
2	2	2	2	4	4
2	2	2	2	3	4
4	4	4	2	5	4
5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3
5	5	5	5	2	5
6	2	3	4	3	3
7	3	4	4	4	4
8	3	5	4	2	4
9	4	4	5	4	3
10	2	3	4	3	3
11	4	4	4	3	2
12	4	4	4	3	3
13	2	2	3	2	2
14	4	4	3	4	4
15	2	3	2	2	2
16	4	2	4	4	4
17	4	4	2	2	2
18	3	3	2	2	3
19	3	4	4	4	4
20	1	1	2	2	2
21	3	4	4	4	4
22	3	4	4	4	4
23	3	3	2	2	3
24	1	1	1	1	1
25	2	3	2	2	2
26	1	1	1	2	2
27	4	4	1	2	2
28	2	2	1	1	2
29	4	4	4	4	3
30	4	4	4	4	4
31	2	2	2	2	3
32	3	4	4	4	4
33	2	3	2	2	2
34	4	4	4	3	3
35	4	4	4	3	3
36	4	4	4	3	3
37	2	3	2	2	2
38	3	4	4	4	4
39	5	5	5	4	5
40	4	4	4	4	5
41	3	3	4	4	3

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
1	1	1	1	1	3
2	1	1	1	1	3
3	4	4	2	4	4
4	3	3	3	2	2
5	5	3	5	2	3
6	3	2	4	2	4
7	3	3	3	2	3
8	3	3	5	5	4
9	5	5	4	2	4
10	3	3	3	3	3
11	4	2	4	2	4
12	4	3	4	2	4
13	3	3	3	3	4
14	5	5	3	2	2
15	3	3	2	3	4
16	4	4	4	4	4
17	2	2	2	4	4
18	2	2	3	3	2
19	3	3	3	2	3
20	4	2	4	2	4
21	4	4	4	5	5
22	5	5	4	2	4
23	2	2	3	3	2
24	1	1	1	1	3
25	3	3	2	3	4
26	2	2	1	1	3
27	2	2	3	1	3
28	1	1	1	1	3
29	4	3	2	2	4
30	5	5	5	5	4
31	2	2	3	2	3
32	3	3	2	3	4
33	2	2	3	3	2
34	3	3	4	2	3
35	4	3	4	3	4
36	4	3	4	3	4
37	3	3	2	4	5
38	4	4	4	5	5
39	2	3	2	4	3
40	5	5	5	4	5
41	4	4	4	5	5

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7
1	3	3	4	3	4	3	3
2	1	2	2	3	3	3	2
3	4	4	3	4	4	4	4
4	3	3	2	4	5	4	2
5	1	5	3	3	5	3	4
6	2	2	4	3	4	2	2
7	4	4	4	3	4	3	4
8	3	2	3	4	4	3	3
9	2	2	3	3	3	3	3
10	2	3	3	2	2	2	2
11	2	4	2	4	4	2	4
12	2	4	2	4	3	3	4
13	2	3	2	3	3	3	2
14	4	4	2	3	3	3	3
15	2	3	3	3	3	3	3
16	4	4	5	4	4	4	4
17	2	4	3	3	4	2	4
18	3	4	3	4	4	4	3
19	4	4	4	3	4	3	4
20	1	2	2	2	3	4	4
21	4	4	4	3	4	3	4
22	4	4	4	3	4	3	4
23	2	3	2	3	4	2	2
24	3	3	2	4	5	4	2
25	2	3	3	3	4	2	3
26	1	3	2	3	5	4	4
27	4	3	2	3	5	4	4
28	3	2	3	3	4	2	3
29	2	4	2	4	4	2	4
30	1	3	2	4	4	3	4
31	3	3	3	3	4	3	3
32	2	2	2	4	4	4	4
33	2	3	3	3	3	3	3
34	4	4	2	4	4	3	3
35	4	4	3	4	4	3	3
36	4	4	3	4	4	3	3
37	3	3	3	4	3	4	3
38	4	4	4	3	4	3	4
39	5	5	5	4	4	5	4
40	4	4	4	5	5	5	4
41	4	4	4	4	4	4	4

X5a.1	X5a.2	X5a.3	X5a.4	X5a.5	X5a.6	X5b.1	X5b.2	X5b.3	X5b.4	X5b.5
3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
4	3	2	3	3	4	4	3	3	3	4
4	4	3	3	3	5	3	5	2	5	5
3	3	2	4	2	4	5	5	4	4	4
3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4
3	3	2	2	4	4	2	4	3	1	5
4	4	2	2	4	4	2	4	4	4	4
5	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5
4	4	4	2	3	4	2	4	4	3	4
4	4	4	2	4	4	2	4	4	3	4
4	4	4	2	3	4	2	4	4	3	4
3	4	2	2	3	4	2	2	3	3	4
4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4
4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4
4	4	3	3	3	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	2	4	2	4	2	2	3	3	4
4	3	2	3	3	4	2	4	4	4	4
3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4
3	3	2	4	4	4	5	4	3	3	4
4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4
2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1
4	4	3	3	4	4	2	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	3	3	4	4	2	4	4	4	4
4	4	3	3	4	4	2	4	4	4	4
4	4	3	3	4	4	2	4	4	4	4
4	4	3	3	4	4	2	4	4	4	4
4	4	3	3	4	4	2	4	4	4	4
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4

X5C. 1	X5C. 2	X5C. 3	X5C. 4	X5C. 5	X5d. 1	X5d. 2	X5d. 3	X5d. 4	X5d. 5	X5d. 6	X5d. 7	X5d. 8
3	3	1	4	1	3	3	3	3	3	3	4	5
4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4
4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4
3	3	3	3	3	3	4	5	4	4	5	5	5
4	2	2	4	2	4	4	4	3	2	3	3	3
4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
3	3	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
5	2	1	4	3	4	4	3	4	4	4	4	2
4	4	1	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
4	2	4	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4
4	2	3	4	2	4	4	3	3	3	4	4	3
4	2	2	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4
4	2	4	4	2	4	4	4	3	3	3	4	4
4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	2	2	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
4	3	4	2	4	4	2	2	4	4	4	4	4
4	2	2	4	2	4	4	4	4	4	5	5	5
4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5
2	3	2	3	3	4	4	2	4	4	3	4	4
2	3	2	3	3	4	4	2	4	4	3	4	4
4	2	2	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4
4	4	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3
1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4
2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	5
2	2	2	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4
4	2	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4
4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4
4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4
4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3
4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4
4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3

No.	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9
1	3	1	1	1	1	1	2	1	2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	2	2	2	3	3	3	3	2	3
5	4	5	5	5	5	5	4	4	3
6	4	4	4	2	2	4	4	3	4
7	3	3	4	3	2	3	4	2	4
8	5	5	5	2	5	5	5	3	3
9	4	4	4	4	4	4	4	2	2
10	4	3	3	3	3	5	5	5	3
11	4	4	2	2	4	4	4	2	4
12	4	4	2	3	4	4	4	2	4
13	2	2	2	2	2	3	3	2	2
14	4	4	4	3	4	4	4	4	2
15	3	3	3	2	3	3	3	2	2
16	4	4	4	2	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	2
18	3	3	3	2	2	2	3	3	4
19	3	3	4	3	2	3	4	2	4
20	2	4	4	4	4	4	4	4	3
21	5	5	5	2	5	5	5	3	3
22	4	4	4	4	4	4	4	2	2
23	3	3	3	2	2	2	3	3	4
24	3	3	3	2	2	2	3	3	4
25	4	4	4	4	4	4	4	2	2
26	5	5	5	5	4	2	5	2	3
27	5	5	5	5	4	2	5	2	3
28	2	1	1	1	1	2	2	1	2
29	4	4	2	4	4	4	4	2	4
30	5	5	5	5	5	5	5	4	5
31	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32	3	3	4	3	2	3	4	2	4
33	2	2	2	3	3	3	3	2	3
34	3	2	2	2	4	4	4	2	4
35	4	4	2	2	4	4	3	2	2
36	4	4	2	2	4	4	3	2	2
37	4	4	4	4	4	4	4	4	3
38	4	4	4	4	4	4	4	4	3
39	5	5	5	5	5	5	5	3	3
40	4	5	5	5	5	5	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	3	4

No.	Y1.10	Y1.11	Y1.12	Y1.13	Y1.14	Y1.15	Y1.16	Y1.17	Y1.18
1	1	2	2	2	3	3	3	2	3
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	3	3	4	2	3
5	5	3	3	5	3	3	5	3	5
6	4	2	3	4	2	2	4	2	4
7	4	4	4	4	3	2	2	2	3
8	2	3	4	3	4	3	5	4	5
9	4	3	2	3	2	2	3	2	4
10	3	4	3	3	3	3	4	3	5
11	4	2	2	4	4	2	4	2	2
12	4	2	2	3	4	4	4	2	2
13	4	2	3	4	2	3	3	2	3
14	4	2	4	4	3	4	4	3	3
15	4	3	3	3	3	2	3	2	3
16	4	4	5	5	4	4	4	4	4
17	4	2	4	4	4	4	4	2	2
18	4	3	3	4	3	2	3	3	3
19	4	4	4	4	3	2	2	2	3
20	4	2	3	4	3	4	3	4	3
21	2	3	4	3	4	3	5	4	5
22	4	3	2	3	2	2	3	2	4
23	4	3	3	4	3	2	3	3	3
24	4	3	3	4	3	2	3	3	3
25	4	3	2	3	2	2	3	2	4
26	4	3	4	4	4	2	2	4	4
27	4	3	4	4	4	2	2	4	4
28	2	2	2	2	2	1	2	2	2
29	2	3	3	4	4	2	4	2	2
30	5	5	4	4	4	5	5	4	4
31	2	3	2	2	3	3	3	3	3
32	4	4	4	4	3	2	2	2	3
33	4	3	4	4	3	3	4	2	3
34	4	2	2	4	4	2	4	2	2
35	4	3	2	4	4	2	4	2	2
36	4	3	2	4	4	2	4	2	2
37	3	2	4	4	4	4	4	2	2
38	3	2	4	4	4	4	4	2	2
39	4	3	4	3	4	3	5	4	5
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Lampiran 6: Hasil Uji Kualitas Data

Uji validitas-variabel Keadilan (X1)

Variabel	Koefisien Validitas	Keterangan
X1.1	0.924	Valid
X1.2	0.900	Valid
X1.3	0.875	Valid
X1.4	0.823	Valid
X1.5	0.854	Valid
X1.6	0.719	Valid

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Uji validitas-variabel Sistem Perpajakan (X2)

Variabel	Koefisien Validitas	Keterangan
X2.1	0.871	Valid
X2.2	0.886	Valid
X2.3	0.919	Valid
X2.4	0.854	Valid
X2.5	0.884	Valid

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Uji validitas-variabel Diskriminasi (X3)

Variabel	Koefisien Validitas	Keterangan
X3.1	0.880	Valid
X3.2	0.869	Valid
X3.3	0.794	Valid
X3.4	0.737	Valid
X3.5	0.668	Valid

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Uji validitas-variabel *Machiavellianism* (X4)

Variabel	Koefisien Validitas	Keterangan
X4.1	0.784	Valid
X4.2	0.707	Valid
X4.3	0.617	Valid
X4.4	0.574	Valid
X4.5	0.529	Valid
X4.6	0.606	Valid
X4.7	0.594	Valid

Sumber: Data primer, diolah, 2017

**Uji validitas-variabel Pengetahuan
Pajak (X5)**

Variabel	Koefisien Validitas	Keterangan
X5.1	0.647	Valid
X5.2	0.673	Valid
X5.3	0.617	Valid
X5.4	0.539	Valid
X5.5	0.689	Valid
X5.6	0.795	Valid
X5.7	0.533	Valid
X5.8	0.709	Valid
X5.9	0.539	Valid
X5.10	0.532	Valid
X5.11	0.538	Valid
X5.12	0.698	Valid
X5.13	0.516	Valid
X5.14	0.566	Valid
X5.15	0.569	Valid
X5.16	0.539	Valid
X5.17	0.736	Valid
X5.18	0.544	Valid
X5.19	0.577	Valid
X5.20	0.715	Valid
X5.21	0.695	Valid
X5.22	0.782	Valid
X5.23	0.737	Valid
X5.24	0.513	Valid

**Uji validitas-variabel Persepsi
Etika atas Penghindaran dan
Penggelapan Pajak (X5)**

Variabel	Koefisien Validitas	Keterangan
Y1.1	0.763	Valid
Y1.2	0.868	Valid
Y1.3	0.831	Valid
Y1.4	0.727	Valid
Y1.5	0.821	Valid
Y1.6	0.759	Valid
Y1.7	0.850	Valid
Y1.8	0.729	Valid
Y1.9	0.523	Valid
Y1.10	0.572	Valid
Y1.11	0.592	Valid
Y1.12	0.693	Valid
Y1.13	0.657	Valid
Y1.14	0.677	Valid
Y1.15	0.655	Valid
Y1.16	0.674	Valid
Y1.17	0.729	Valid
Y1.18	0.659	Valid

Sumber: Data primer, diolah, 2017

Lampiran 7: Hasil Output SPSS

Correlations

Correlations

		X1
X1.1	Pearson Correlation	.924**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X1.2	Pearson Correlation	.900**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X1.3	Pearson Correlation	.875**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X1.4	Pearson Correlation	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X1.5	Pearson Correlation	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X1.6	Pearson Correlation	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	41	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	41	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.920	6

Correlations

Correlations

		X2
X2.1	Pearson Correlation	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X2.2	Pearson Correlation	.886**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X2.3	Pearson Correlation	.919**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X2.4	Pearson Correlation	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X2.5	Pearson Correlation	.884**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	41	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	41	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.929	5

Correlations

Correlations

		X3
X3.1	Pearson Correlation	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X3.2	Pearson Correlation	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X3.3	Pearson Correlation	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X3.4	Pearson Correlation	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X3.5	Pearson Correlation	.668**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	41	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	41	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.850	5

Correlations

Correlations

		X4
X4.1	Pearson Correlation	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X4.2	Pearson Correlation	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X4.3	Pearson Correlation	.617**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X4.4	Pearson Correlation	.574**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X4.5	Pearson Correlation	.529**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X4.6	Pearson Correlation	.606**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X4.7	Pearson Correlation	.594**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	41	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	41	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.750	7

Correlations

Correlations		
		X5
X51	Pearson Correlation	.647**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5a.2	Pearson Correlation	.673**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5a.3	Pearson Correlation	.617**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5a.4	Pearson Correlation	.539**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5a.5	Pearson Correlation	.689**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5a.6	Pearson Correlation	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5b.1	Pearson Correlation	.533**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5b.2	Pearson Correlation	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5b.3	Pearson Correlation	.539**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5b.4	Pearson Correlation	.532**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5b.5	Pearson Correlation	.538**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5C.1	Pearson Correlation	.698**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5C.2	Pearson Correlation	.516**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	41
X5C.3	Pearson Correlation	.566**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5C.4	Pearson Correlation	.569**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5C.5	Pearson Correlation	.539**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5d.1	Pearson Correlation	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5d.2	Pearson Correlation	.544**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5d.3	Pearson Correlation	.577**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5d.4	Pearson Correlation	.715**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5d.5	Pearson Correlation	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5d.6	Pearson Correlation	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5d.7	Pearson Correlation	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
X5d.8	Pearson Correlation	.513**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	41

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	41	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	41	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.921	24

Correlations

Correlations

		Y
Y1.1	Pearson Correlation	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.2	Pearson Correlation	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.3	Pearson Correlation	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.4	Pearson Correlation	.727**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.5	Pearson Correlation	.821**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.6	Pearson Correlation	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.7	Pearson Correlation	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.8	Pearson Correlation	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.9	Pearson Correlation	.523**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.10	Pearson Correlation	.572**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.11	Pearson Correlation	.592**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.12	Pearson Correlation	.693**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.13	Pearson Correlation	.657**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.14	Pearson Correlation	.677**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.15	Pearson Correlation	.655**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.16	Pearson Correlation	.674**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.17	Pearson Correlation	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41
Y1.18	Pearson Correlation	.659**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	41

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	41	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	41	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.942	18

Frequency Table

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	10	24.4	24.4	24.4
	2.00	21	51.2	51.2	75.6
	3.00	3	7.3	7.3	82.9
	4.00	5	12.2	12.2	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	11	26.8	26.8	26.8
	2.00	20	48.8	48.8	75.6
	3.00	3	7.3	7.3	82.9
	4.00	5	12.2	12.2	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	19.5	19.5	19.5
	2.00	22	53.7	53.7	73.2
	3.00	4	9.8	9.8	82.9
	4.00	5	12.2	12.2	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	17.1	17.1	17.1
	2.00	21	51.2	51.2	68.3
	3.00	3	7.3	7.3	75.6
	4.00	8	19.5	19.5	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	5	12.2	12.2	12.2
	2.00	5	12.2	12.2	24.4
	3.00	7	17.1	17.1	41.5
	4.00	16	39.0	39.0	80.5
	5.00	8	19.5	19.5	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	5	12.2	12.2	12.2
	2.00	6	14.6	14.6	26.8
	3.00	1	2.4	2.4	29.3
	4.00	25	61.0	61.0	90.2
	5.00	4	9.8	9.8	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	5	12.2	12.2	12.2
	2.00	9	22.0	22.0	34.1
	3.00	10	24.4	24.4	58.5
	4.00	15	36.6	36.6	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	5	12.2	12.2	12.2
	2.00	4	9.8	9.8	22.0
	3.00	9	22.0	22.0	43.9
	4.00	20	48.8	48.8	92.7
	5.00	3	7.3	7.3	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	6	14.6	14.6	14.6
	2.00	9	22.0	22.0	36.6
	3.00	2	4.9	4.9	41.5
	4.00	21	51.2	51.2	92.7
	5.00	3	7.3	7.3	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	9.8	9.8	9.8
	2.00	14	34.1	34.1	43.9
	3.00	7	17.1	17.1	61.0
	4.00	16	39.0	39.0	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	7.3	7.3	7.3
	2.00	11	26.8	26.8	34.1
	3.00	13	31.7	31.7	65.9
	4.00	11	26.8	26.8	92.7
	5.00	3	7.3	7.3	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	9.8	9.8	9.8
	2.00	8	19.5	19.5	29.3
	3.00	12	29.3	29.3	58.5
	4.00	11	26.8	26.8	85.4
	5.00	6	14.6	14.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	9.8	9.8	9.8
	2.00	10	24.4	24.4	34.1
	3.00	17	41.5	41.5	75.6
	4.00	5	12.2	12.2	87.8
	5.00	5	12.2	12.2	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	5	12.2	12.2	12.2
2.00	8	19.5	19.5	31.7
3.00	11	26.8	26.8	58.5
4.00	13	31.7	31.7	90.2
5.00	4	9.8	9.8	100.0
Total	41	100.0	100.0	

X3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	6	14.6	14.6	14.6
2.00	14	34.1	34.1	48.8
3.00	10	24.4	24.4	73.2
4.00	6	14.6	14.6	87.8
5.00	5	12.2	12.2	100.0
Total	41	100.0	100.0	

X3.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	5	12.2	12.2	12.2
3.00	13	31.7	31.7	43.9
4.00	18	43.9	43.9	87.8
5.00	5	12.2	12.2	100.0
Total	41	100.0	100.0	

X4.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	5	12.2	12.2	12.2
2.00	13	31.7	31.7	43.9
3.00	8	19.5	19.5	63.4
4.00	14	34.1	34.1	97.6
5.00	1	2.4	2.4	100.0
Total	41	100.0	100.0	

X4.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	7	17.1	17.1	17.1
3.00	14	34.1	34.1	51.2
4.00	18	43.9	43.9	95.1
5.00	2	4.9	4.9	100.0
Total	41	100.0	100.0	

X4.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	15	36.6	36.6	36.6
3.00	15	36.6	36.6	73.2
4.00	9	22.0	22.0	95.1
5.00	2	4.9	4.9	100.0
Total	41	100.0	100.0	

X4.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	4.9	4.9	4.9
	3.00	21	51.2	51.2	56.1
	4.00	17	41.5	41.5	97.6
	5.00	1	2.4	2.4	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X4.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.4	2.4	2.4
	3.00	9	22.0	22.0	24.4
	4.00	25	61.0	61.0	85.4
	5.00	6	14.6	14.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X4.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	19.5	19.5	19.5
	3.00	20	48.8	48.8	68.3
	4.00	11	26.8	26.8	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X4.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	17.1	17.1	17.1
	3.00	14	34.1	34.1	51.2
	4.00	20	48.8	48.8	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X51

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.4	2.4	2.4
	3.00	12	29.3	29.3	31.7
	4.00	27	65.9	65.9	97.6
	5.00	1	2.4	2.4	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5a.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.4	2.4	2.4
	3.00	13	31.7	31.7	34.1
	4.00	25	61.0	61.0	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5a.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	4.9	4.9	4.9
	2.00	12	29.3	29.3	34.1
	3.00	4	9.8	9.8	43.9
	4.00	22	53.7	53.7	97.6
	5.00	1	2.4	2.4	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5a.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	12	29.3	29.3	29.3
	3.00	5	12.2	12.2	41.5
	4.00	21	51.2	51.2	92.7
	5.00	3	7.3	7.3	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5a.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	9.8	9.8	9.8
	3.00	9	22.0	22.0	31.7
	4.00	26	63.4	63.4	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5b.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	18	43.9	43.9	46.3
	3.00	1	2.4	2.4	48.8
	4.00	13	31.7	31.7	80.5
	5.00	8	19.5	19.5	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5b.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	9.8	9.8	9.8
	3.00	1	2.4	2.4	12.2
	4.00	32	78.0	78.0	90.2
	5.00	4	9.8	9.8	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5b.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	7.3	7.3	7.3
	3.00	5	12.2	12.2	19.5
	4.00	30	73.2	73.2	92.7
	5.00	3	7.3	7.3	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5b.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	4.9	4.9	4.9
	2.00	6	14.6	14.6	19.5
	3.00	8	19.5	19.5	39.0
	4.00	23	56.1	56.1	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5b.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	3.00	5	12.2	12.2	14.6
	4.00	31	75.6	75.6	90.2
	5.00	4	9.8	9.8	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5C.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	6	14.6	14.6	17.1
	3.00	2	4.9	4.9	22.0
	4.00	30	73.2	73.2	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5C.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	21	51.2	51.2	51.2
	3.00	8	19.5	19.5	70.7
	4.00	11	26.8	26.8	97.6
	5.00	1	2.4	2.4	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5C.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	5	12.2	12.2	12.2
	2.00	12	29.3	29.3	41.5
	3.00	7	17.1	17.1	58.5
	4.00	14	34.1	34.1	92.7
	5.00	3	7.3	7.3	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5C.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	9.8	9.8	9.8
	3.00	11	26.8	26.8	36.6
	4.00	24	58.5	58.5	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5C.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	14	34.1	34.1	36.6
	3.00	11	26.8	26.8	63.4
	4.00	12	29.3	29.3	92.7
	5.00	3	7.3	7.3	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5d.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	4.9	4.9	4.9
	3.00	4	9.8	9.8	14.6
	4.00	34	82.9	82.9	97.6
	5.00	1	2.4	2.4	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5d.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	14.6	14.6	14.6
	3.00	6	14.6	14.6	29.3
	4.00	29	70.7	70.7	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5d.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	14	34.1	34.1	34.1
	3.00	4	9.8	9.8	43.9
	4.00	17	41.5	41.5	85.4
	5.00	6	14.6	14.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5d.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	1	2.4	2.4	4.9
	3.00	6	14.6	14.6	19.5
	4.00	31	75.6	75.6	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5d.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	9.8	9.8	9.8
	3.00	4	9.8	9.8	19.5
	4.00	27	65.9	65.9	85.4
	5.00	6	14.6	14.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5d.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	4.9	4.9	4.9
	3.00	8	19.5	19.5	24.4
	4.00	22	53.7	53.7	78.0
	5.00	9	22.0	22.0	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5d.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	4.9	4.9	4.9
	4.00	31	75.6	75.6	80.5
	5.00	8	19.5	19.5	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

X5d.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	7	17.1	17.1	19.5
	3.00	3	7.3	7.3	26.8
	4.00	23	56.1	56.1	82.9
	5.00	7	17.1	17.1	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	6	14.6	14.6	17.1
	3.00	9	22.0	22.0	39.0
	4.00	19	46.3	46.3	85.4
	5.00	6	14.6	14.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	7.3	7.3	7.3
	2.00	5	12.2	12.2	19.5
	3.00	8	19.5	19.5	39.0
	4.00	17	41.5	41.5	80.5
	5.00	8	19.5	19.5	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	7.3	7.3	7.3
	2.00	10	24.4	24.4	31.7
	3.00	5	12.2	12.2	43.9
	4.00	15	36.6	36.6	80.5
	5.00	8	19.5	19.5	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	7.3	7.3	7.3
	2.00	14	34.1	34.1	41.5
	3.00	8	19.5	19.5	61.0
	4.00	10	24.4	24.4	85.4
	5.00	6	14.6	14.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	7.3	7.3	7.3
	2.00	9	22.0	22.0	29.3
	3.00	4	9.8	9.8	39.0
	4.00	19	46.3	46.3	85.4
	5.00	6	14.6	14.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	4.9	4.9	4.9
	2.00	7	17.1	17.1	22.0
	3.00	7	17.1	17.1	39.0
	4.00	18	43.9	43.9	82.9
	5.00	7	17.1	17.1	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	3	7.3	7.3	9.8
	3.00	9	22.0	22.0	31.7
	4.00	21	51.2	51.2	82.9
	5.00	7	17.1	17.1	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	7.3	7.3	7.3
	2.00	19	46.3	46.3	53.7
	3.00	8	19.5	19.5	73.2
	4.00	10	24.4	24.4	97.6
	5.00	1	2.4	2.4	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	14	34.1	34.1	36.6
	3.00	10	24.4	24.4	61.0
	4.00	15	36.6	36.6	97.6
	5.00	1	2.4	2.4	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	4.9	4.9	4.9
	2.00	5	12.2	12.2	17.1
	3.00	1	2.4	2.4	19.5
	4.00	30	73.2	73.2	92.7
	5.00	3	7.3	7.3	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	12	29.3	29.3	31.7
	3.00	19	46.3	46.3	78.0
	4.00	7	17.1	17.1	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	11	26.8	26.8	29.3
	3.00	11	26.8	26.8	56.1
	4.00	16	39.0	39.0	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	3	7.3	7.3	9.8
	3.00	9	22.0	22.0	31.7
	4.00	25	61.0	61.0	92.7
	5.00	3	7.3	7.3	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	6	14.6	14.6	17.1
	3.00	15	36.6	36.6	53.7
	4.00	18	43.9	43.9	97.6
	5.00	1	2.4	2.4	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	4.9	4.9	4.9
	2.00	18	43.9	43.9	48.8
	3.00	10	24.4	24.4	73.2
	4.00	9	22.0	22.0	95.1
	5.00	2	4.9	4.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	6	14.6	14.6	17.1
	3.00	11	26.8	26.8	43.9
	4.00	17	41.5	41.5	85.4
	5.00	6	14.6	14.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	22	53.7	53.7	56.1
	3.00	7	17.1	17.1	73.2
	4.00	10	24.4	24.4	97.6
	5.00	1	2.4	2.4	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Y1.18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.4	2.4	2.4
	2.00	10	24.4	24.4	26.8
	3.00	14	34.1	34.1	61.0
	4.00	10	24.4	24.4	85.4
	5.00	6	14.6	14.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Lampiran 8: Uji Asumsi Klasik

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.820 ^a	.673	.626	8.04433	1.978

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.355	2.814
	X2	.370	2.705
	X3	.404	2.476
	X4	.483	2.069
	X5	.603	1.657

a. Dependent Variable: Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

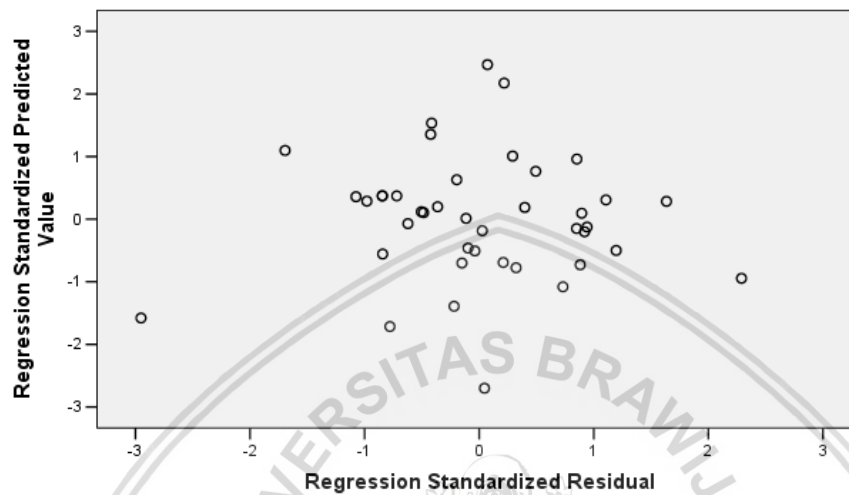
		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.52478317
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.060
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.547
Asymp. Sig. (2-tailed)		.926

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

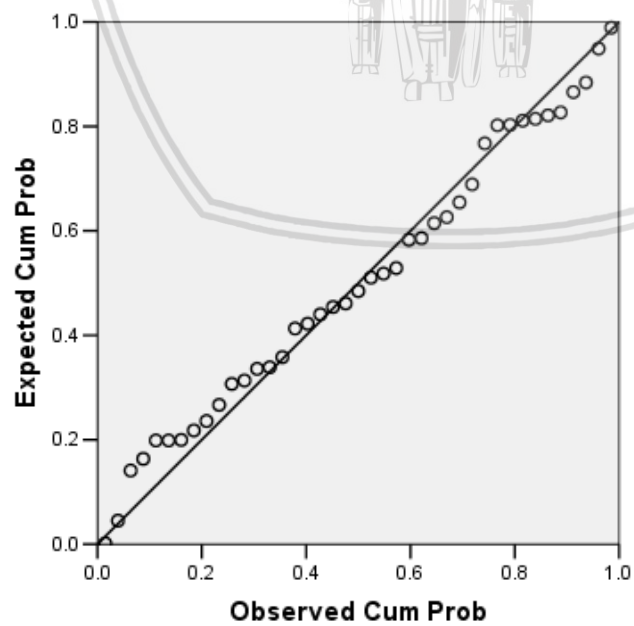
Scatterplot

Dependent Variable: Y



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y



Lampiran 9: Regresi Linier berganda

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	58.7805	13.15962	41
X1	15.9756	5.89274	41
X2	15.2927	5.03609	41
X3	15.4878	4.47840	41
X4	22.9268	3.67008	41
X5	85.9756	11.55528	41

Correlations

		Y	X1	X2	X3	X4	X5
Pearson Correlation	Y	1.000	.717	.629	.706	.512	.652
	X1	.717	1.000	.668	.606	.689	.566
	X2	.629	.668	1.000	.724	.550	.502
	X3	.706	.606	.724	1.000	.379	.543
	X4	.512	.689	.550	.379	1.000	.461
	X5	.652	.566	.502	.543	.461	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000	.000	.000	.000
	X1	.000	.	.000	.000	.000	.000
	X2	.000	.000	.	.000	.000	.000
	X3	.000	.000	.000	.	.007	.000
	X4	.000	.000	.000	.007	.	.001
	X5	.000	.000	.000	.000	.001	.
N	Y	41	41	41	41	41	41
	X1	41	41	41	41	41	41
	X2	41	41	41	41	41	41
	X3	41	41	41	41	41	41
	X4	41	41	41	41	41	41
	X5	41	41	41	41	41	41

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X4, X3, X2, X1 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.820 ^a	.673	.626	8.04433	1.978

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4662.130	5	932.426	14.409	.000 ^a
	Residual	2264.894	35	64.711		
	Total	6927.024	40			

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.605	11.973		.301	.765
	X1	.761	.362	.341	2.102	.043
	X2	.029	.415	.011	.069	.945
	X3	1.013	.447	.345	2.266	.030
	X4	.081	.499	.023	.163	.872
	X5	.291	.142	.256	2.054	.047

a. Dependent Variable: Y